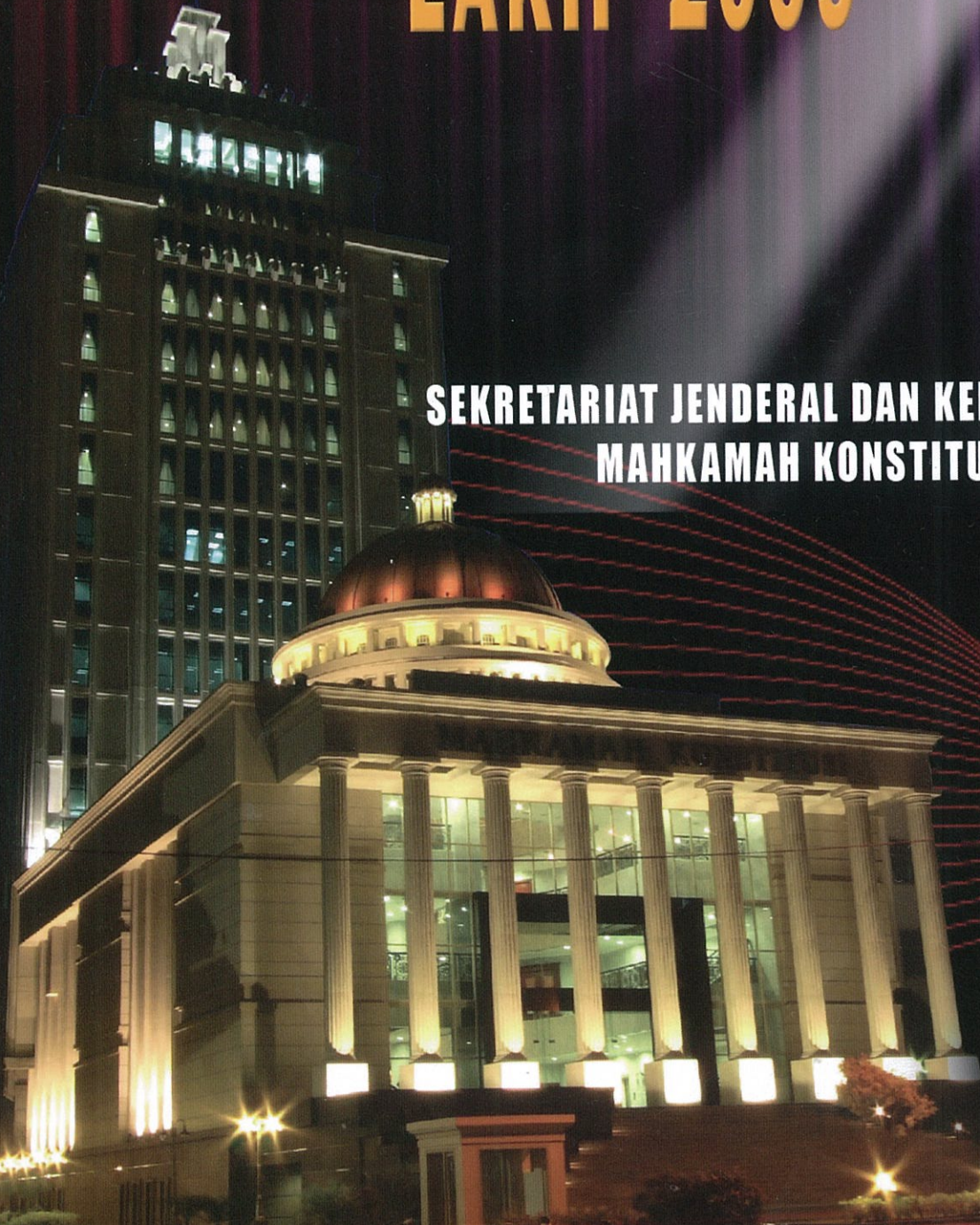




MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2009

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2009**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

## KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait. Laporan itu disusun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini juga merupakan respon atas Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2009.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk dapat memberikan layanan kepada publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya tersebut terwujud secara sinergis salah satunya melalui SAKIP sehingga cita menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, responsif dan transparan menjadi kenyataan.

Dalam penerapan SAKIP, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) MK 2010-2014 yang memberi arah yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengembangan MK selama kurun waktu 2010 s.d. 2014. Melalui Renstra MK, visi, misi, tujuan/sasaran, program yang realistis dan antisipasi permasalahan masa depan terangkum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selaras dengan SAKIP, Renstra inilah yang dijadikan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja MK di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 ini disusun sebagai upaya MK untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan satu tahun.

Jakarta, 22 Februari 2010  
**Sekretaris Jenderal,**

**JANEDJRI M. GAFFAR**  
NIP. 19631025 198802 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Kedudukan dan Wewenang.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumber Daya Manusia.....	4

### **BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA**

A. Kebijakan Organisasi.....	6
B. Tujuan Strategis dan Sasaran Kinerja.....	7
C. Rencana Kinerja.....	8

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Evaluasi Kinerja.....	12
B. Evaluasi Anggaran.....	35

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. KEDUDUKAN DAN WEWENANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam UUD 1945 dan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Keempat wewenang MK itu ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melaksanakan wewenangnya, MK didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan administrasi umum dan administrasi justisial kepada MK. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan membuat program kerja yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Program kerja tersebut juga merupakan wujud operasional dari misi MK.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif; pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga; pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepaniteraan dalam melaksanakan dukungan administrasi justisial mempunyai fungsi-fungsi antara lain koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial; pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; pembinaan pelayanan teknis kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan MK; dan tugas lain yang diberikan Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera. Sekretaris Jenderal dan Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal yang saat ini bertugas diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2004. Sedangkan Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal. Pejabat fungsional Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera. Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Pasal 5 Keppres Nomor 51 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya lima Biro, masing-masing biro terdiri atas sebanyak-banyaknya empat Bagian, dan masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga Sub Bagian. Sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Kepaniteraan dan Kejurupanggilan.

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat untuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian. Struktur Pusat tersebut terdiri dari dua bidang, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia. Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa. Sedangkan Panitera dan pejabat di lingkungan Kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres 51 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, telah ditetapkan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, tanggal 20 Agustus 2004.

Sekretariat Jenderal memiliki Empat biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Setiap Biro terdiri dari Bagian dan Sub Bagian.

Biro Keuangan dan Perencanaan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian Perencanaan terdiri dari Sub Bagian Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan, dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Biro ini melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan MK.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Persuratan dan Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perlengkapan terdiri dari Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan, dan Inventarisasi, dan Sub Bagian Rumah Tangga. Tugas dan fungsi Biro Umum adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan MK.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari dua Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat

terdiri dari Sub Bagian Antar Lembaga dan Masyarakat dan Sub Bagian Media Massa. Sedangkan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas dan fungsi Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi, pengelolaan penerbitan, publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai MK, serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Risalah dan Putusan. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Bagian Persidangan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Persidangan dan Sub Bagian Pemanggilan. Adapun Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Risalah dan Sub Bagian Pelayanan Putusan. Biro ini melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK.

Selain biro-biro, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dilengkapi dengan sebuah pusat penelitian dan pengkajian. Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di bidang penelitian dan pengkajian. Puslitka dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puslitka menyelenggarakan fungsi sebagai; (a) penyusun rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan; (b) pelaksana penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan, serta pengembangan; (c) pelaksana dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian; (d) pengelola administrasi jabatan fungsional peneliti; (e) pelaksana evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian; (f) pengelola perpustakaan; dan (g) pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka.

Puslitka terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka, dan pengelolaan perpustakaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MK sesuai dengan keahliannya.

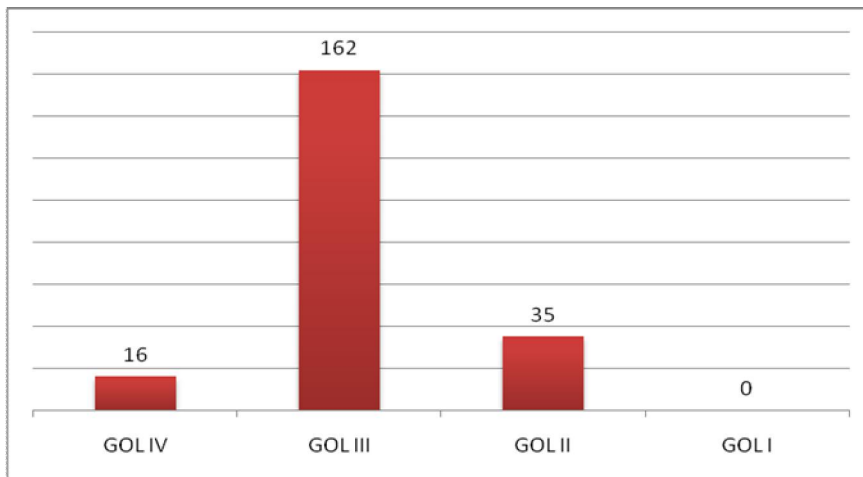
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Kepala Puslitka. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera yang setara dengan Eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti yang bertugas secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Pengganti selalu mendampingi hakim konstitusi dalam proses penyelesaian perkara baik dalam persidangan maupun dalam rapat permusyawaratan hakim. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil.

**C. SUMBER DAYA MANUSIA**

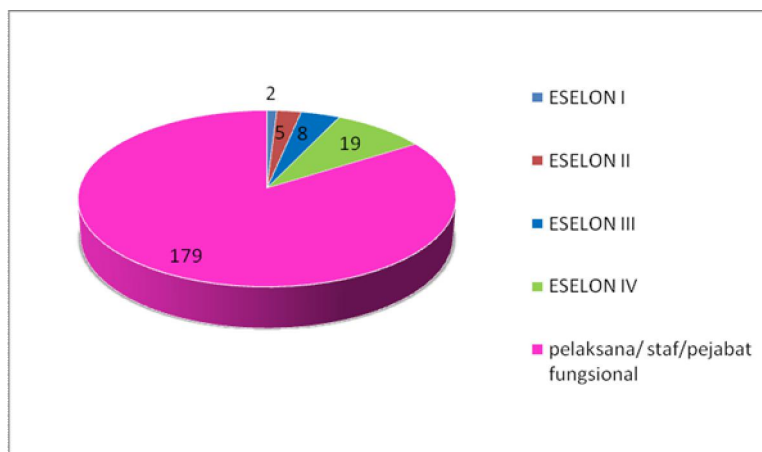
Pegawai di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sampai pada 31 Desember 2009 adalah berjumlah 213 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 20 orang berstatus tenaga perbantuan sedangkan 193 orang berstatus pegawai MK. Berdasarkan komposisi golongan, tidak terdapat pegawai pada golongan I, pada golongan II sebanyak 35 orang, pada golongan III ini mengalami peningkatan dari tahun 2008, yang sebelumnya sebanyak 117 orang, menjadi sebanyak 162 orang di tahun 2009, sedangkan golongan IV mengalami penurunan jumlah, di tahun 2008 sebanyak 18 orang, di tahun 2009 menjadi 16 orang.

**Jumlah PNS  
Berdasarkan Golongan/Ruang  
Tahun 2009**

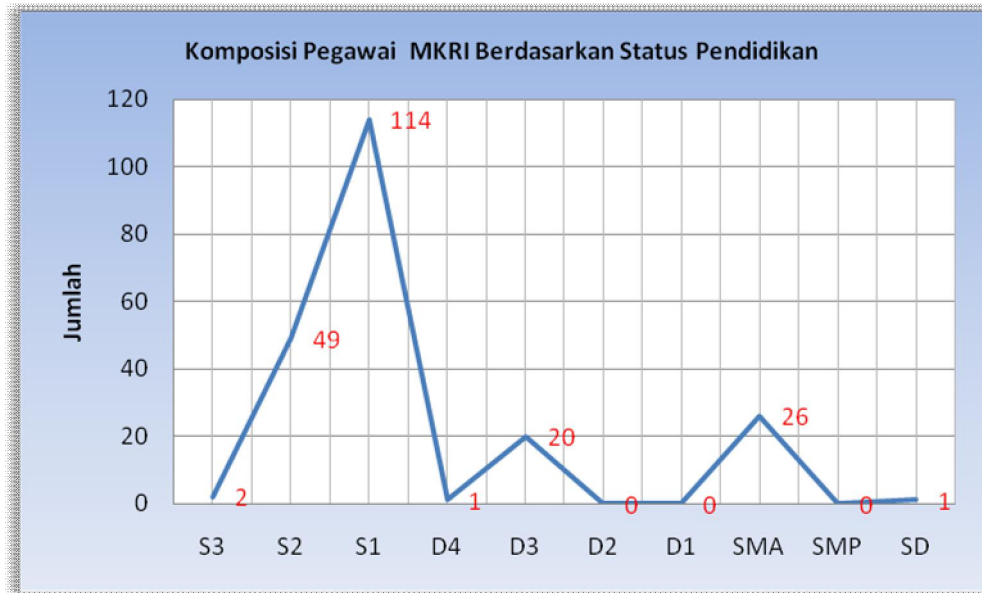


Dinamika komposisi kepegawaian juga tampak pada eselonisasi. Eselon IV berjumlah 19 orang, eselon III sebanyak 8 orang, eselon II terdiri dari 5 orang, eselon I sebanyak 2 orang yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Panitera. Sedangkan sebanyak 194 orang dari pegawai terdiri atas pelaksana/ staf/pejabat fungsional.

**Komposisi PNS  
Berdasarkan Eselon  
Tahun 2009**

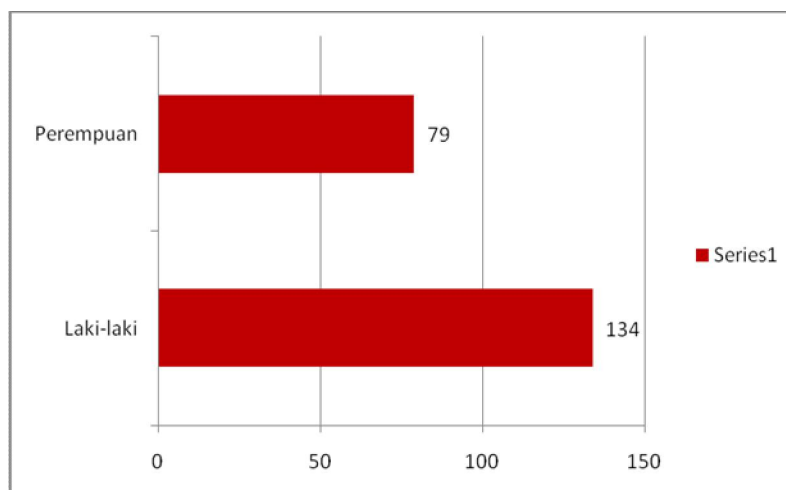






Berdasarkan status pendidikan, pegawai MKRI yang terdiri dari 213 orang memiliki status pendidikan yang beraneka ragam, dari mulai tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai tingkat sarjana strata 3 (S3). Pegawai yang meraih pendidikan S3 adalah sebanyak 2 orang, pegawai yang telah mencapai gelar S2 adalah sebanyak 49 orang, sedangkan untuk tingkat sarjana strata 1 (S1) menempati komposisi paling banyak di MKRI, yaitu berjumlah sebesar 114 orang. Untuk tingkat diploma, pegawai MKRI yang berstatus pendidikan tingkat D3 berjumlah 20 orang, sedangkan D1 hanya sebanyak 1 orang. Dalam klasifikasi sekolah menengah atas berjumlah 26 orang dan sekolah dasar 1 orang pegawai.

**Komposisi Pegawai MKRI  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2009**



Pegawai MKRI berdasarkan komposisi jenis kelamin di tahun 2009, pegawai laki-laki terdiri dari 134 orang sedangkan pegawai perempuan sebanyak 79 orang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

A. KEBIJAKAN ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK berupaya untuk mewujudkannya dengan melakukan peningkatan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Sasaran dari reformasi birokrasi tersebut antara lain:

1. Birokrasi yang bersih, yaitu upaya yang difokuskan pada pencegahan praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan keuangan, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan, dan penegakan aturan-aturan hukum yang dilakukan secara terus-menerus.
2. Birokrasi yang efisien, yaitu upaya untuk mengurangi pemborosan keuangan negara melalui program-program penghematan bagi pembiayaan operasional birokrasi. Penghitungan beban belanja riil birokrasi adalah fokus utama dari sasaran ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran negara yang dapat di hemat. Pengurangan pemborosan ini terkait dengan besaran organisasi, kualitas dan kuantitas pegawai, serta sistem dan mekanisme kerja pegawai dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
3. Birokrasi yang transparan, yaitu upaya yang difokuskan agar penyelenggaraan urusan administrasi umum dan justisial dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan dibukanya ruang publik antara lain melalui *e-court*, sehingga dapat mempersempit ruang gerak terjadinya korupsi, serta dalam rangka lebih memberdayakan partisipasi masyarakat agar dapat terwujud sistem administrasi lembaga peradilan yang lebih efektif.
4. Birokrasi yang melayani, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengubah orientasi dan paradigma primordialisme (minta dilayani) menjadi birokrasi yang melayani masyarakat. Kemudian dibangun sistem birokrasi menjadi responsif terhadap berbagai keluhan dan kebutuhan Hakim Konstitusi dan masyarakat.

Selanjutnya seperti tertuang dalam Cetak Biru MK yang memuat rumusan visi, misi, tujuan, dan rencana aksi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jangka menengah. Secara sistematis rumusan visi, misi, rencana strategis, tujuan strategis, serta sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

**VISI**

“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”

**MISI**

- ✓ Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- ✓ Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mewujudkan visi dan misi MK sebagai pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK tertuang dalam tiga tahapan pelayanan yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Tiga tahapan tersebut meliputi:

- 1. Tahapan Konsolidasi (2003-2007)** merupakan tahapan memperkuat organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas SDM, sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi, serta pembangunan sarana dan prasarana.
- 2. Tahapan Pelayanan (2008-2009)** merupakan tahapan mewujudkan pelayanan yang modern kepada pemohon, pemangku kepentingan (*stake holder*) dan warga masyarakat.
- 3. Tahapan Profesionalisme (2010 dan seterusnya)** adalah tahapan puncak dimana pelaksanaan tugas administratif ditargetkan telah dapat diselenggarakan secara profesional dengan sistem dan alat yang modern dan canggih sehingga mendekatkan terwujudnya cita-cita membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

## **B. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KINERJA**

Pada tahun 2009 ini bangsa Indonesia telah mengadakan perhelatan politik besar lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi ini tentunya terkait erat dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam hal memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Potensi konflik pemilihan umum tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah Partai Politik yang akan menjadi peserta pemilu dan kemudian menjadi pihak Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil akhir dari Pemilihan Umum ini termasuk penetapan calon anggota legislatif dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pemenang juga ditentukan oleh hasil putusan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tantangan lain yang telah dihadapi oleh MK dalam menyelesaikan perkara PHPU ini juga datang dari rentang waktu pemeriksaan yang sangat singkat, karena selain batas waktu pemeriksaan perkara PHPU telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hasil Pemilu ini juga terkait dengan urgensi keberlangsungan agenda ketatanegaraan RI tahun 2009. Hal-hal yang terkait dengan rentang waktu itulah yang menuntut MK agar dapat melaksanakan persidangan cepat (*speedy trial*) secara efektif.

Demi mewujudkan efektifitas persidangan cepat Mahkamah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sebagai pendukung utama pelaksanaan kewenangan MK harus menyiapkan banyak hal dalam mengantisipasi situasi yang dapat terjadi dalam pemeriksaan perkara PHPU. Dengan berkaca dari pelaksanaan penyelesaian PHPU pada Pemilu 2004, dan menyesuaikan perkembangan aktual ketatanegaraan di Indonesia, maka Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan menetapkan sasaran utama dalam menghadapi PHPU, baik dalam mempersiapkan dukungan administrasi yustisial maupun dukungan administrasi umum terhadap Mahkamah.

Disamping agenda mensukseskan pemilihan umum 2009, pengembangan organisasi juga tetap menjadi sasaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Agenda reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan terhadap MK tetap menjadi perhatian pengembangannya.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pelaksanaan program kegiatan, yaitu Menciptakan Pelayanan Administrasi Lembaga Peradilan MK yang diarahkan pada Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum dan Justisial yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sesuai Aturan Hukum sebagai Perwujudan Lembaga Peradilan yang Modern dan Terpercaya.

### C. RENCANA KINERJA

Dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan pada 2009 ditetapkan beberapa kegiatan dengan indikator kinerja serta target pencapaiannya untuk mengukur keberhasilan dari masing-masing kegiatan. Secara rinci sasaran dan indikator kinerja dan target dari setiap sasaran ditampilkan dalam tabel berikut.

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang modern, cepat dan tepat	1	Jumlah tersusunnya Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	Target
		2	% Jumlah perkara yang diregistrasi	10 PMK/Juknis
		3	% Jumlah Putusan yang tepat waktu	100%
		4	% Jumlah Perkara yang diputus	100%
		5	% Jumlah Pelayanan Sidang	100%
		6	% Jumlah arsip Perkara yang telah putus diserahkan Ke ANRI	100%
		7	% Jumlah berkas perkara yang telah digitalisasi	100%
		8	% Jumlah arsip perkara yang telah diminutasi	120%
		9	Jumlah Panduan Proses Beracara	5 Panduan
2	Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK	1	Berfungsi sistem informasi MK	100%
3	Pengelolaan Kepegawaian yang Profesional	1	Dokumen Analisa Jabatan	100%
		2	Dokumen Assesmen Individu	100%
		3	Dokumen Sistem Penilaian Kinerja	100%
4	Terlaksananya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja MK	1	Renstra 2010-2014	1 dokumen

Selain sasaran yang ditetapkan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, setiap biro memiliki indikator kinerja masing-masing.

• **BIRO ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi	1 Terselenggaranya Diklat Kepaniteraan	100%	2.871.895.000
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkara, persidangan dan dokumentasi yang modern, cepat dan tepat.	1 Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi dan petunjuk teknis	10 PMK/Juknis	1.111.728.000
		2 Jumlah perkara yang diregistrasi	140 perkara	
		3 Jumlah pelayanan sidang	560 sidang	
		4 Jumlah perkara yang diputus	120 perkara	
		5 Jumlah Putusan Tepat Waktu sidang	120 perkara	
		6 Jumlah perkara yang telah diminutasi	120 perkara	
		7 Jumlah perkara yang telah di-digitalisasi	120 perkara	
		8 Jumlah arsip perkara yang telah putus diserahkan ke ANRI	120 perkara	
		9 Jumlah risalah sidang	600 perkara	

• **BIRO UMUM**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	SDM yang profesional berintegritas dan berbasis kompetensi	1 Persentase pegawai yang telah mengikuti Diklatpim I - IV	80%	238.630.000
		2 Rasio Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis sesuai dengan kompetensi tugas	80%	2.507.665.000
		3 Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat prajabatan	80%	107.465.000
		4 Persentase Pendidikan formal yang diperoleh pegawai dalam jumlah susunan jabatan dan syarat jabatan	80%	753.195.000
2	Pengelolaan kepegawaian yang profesional	1 Dokumen Reformasi Birokrasi: 1. Dokumen Analisa Jabatan 2. Dokumen Assessment Individu 3. Dokumen Sistem Penilaian Kinerja	80%	93.400.000

• **BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK	1 Berfungsinya sistem informasi MK	8 Sistem	21.920.000.000
2	Terjalannya Kerjasama dengan Lembaga Eksternal	1 Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan FH PT	34 MoU	-
		2 Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan Pusat Kajian Konstitusi/Organisasi kemasyarakatan/Pemda	56 MoU	-
3	Tersosialisasinya isu konstitusi dan keberadaan Mahkamah Konstitusi	1 Jumlah forum komunikasi tatap muka	59 Forum	11.402.462.000
		2 Jumlah program siaran interaktif melalui media elektronik	2 Media	8.682.333.000
		3 % Putusan MK yang dipublikasikan melalui media massa dan website	100%	7.745.000.000
		4 Jumlah jenis publikasi MK yang didistribusikan ke masyarakat	31 Buku	7.438.289.000
4	Terciptanya pelayanan bagi kegiatan pimpinan	1 Terselenggaranya kegiatan protokoler dan tata usaha pimpinan MK	12 Bulan	669.837.000

• **BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Mahkamah Konstitusi RI	1 Tingkat ketersediaan perolehan Anggaran	100%	643.071.000
		2 Renstra 2010-2014	1 Dok	
		3 Opini Laporan keuangan	WTP	301.464.000
		4 Laporan Evaluasi	4 Lap	
		5 LAKIP 2008	1 Lap	442.934.000
		6 Persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat diterima pertanggungjawabannya oleh KPPN	100%	
		7 Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban perbendaharaan	100%	

**• PUSAT PENELITIAN DAN KAJIAN**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu	
1	2	3	4	5	
1	Tersedianya materi substantif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK	1	Laporan penelitian	2 Laporan	106.421.000
		2	Kajian Perkara	2 Laporan	-
		3	Penyelenggaraan seminar tentang hukum dan konstitusi	9 Kegiatan	930.365.000
2	Persentase referensi tentang hukum dan konstitusi	4	Pustaka Konstitusi	2 Laporan	-

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. EVALUASI KINERJA**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 4 (empat) sasaran yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2009 memiliki capaian kinerja yang cukup tinggi. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang modern, cepat dan terpercaya**

Pada sasaran ini memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang terlihat pada tabel di bawah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Jumlah tersusunnya Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	<b>10 PMK/Juknis</b>	<b>9 PMK/Juknis</b>
% Jumlah perkara yang diregistrasi	<b>100%</b>	<b>100%</b>
% Jumlah Putusan yang tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>
% Jumlah Perkara yang diputus	<b>100%</b>	<b>135%</b>
% Jumlah Pelayanan Sidang	<b>100%</b>	<b>608%</b>
% Jumlah arsip Perkara yang telah putus diserahkan Ke ANRI	<b>100%</b>	<b>135%</b>
% Jumlah berkas perkara yang telah digitalisasi	<b>100%</b>	<b>135%</b>
% Jumlah arsip perkara yang telah diminutasi	<b>120%</b>	<b>135%</b>

**1. a. Jumlah tersusunnya Peraturan MK dan Petunjuk Teknis**

Sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 (1) UUD 1945 mengatur kewenangan yang dimiliki MK. Terdapat 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional MK. Kewenangan MK terdiri dari: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewajiban MK yang diatur dalam UUD 1945 adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Sampai pada tahun 2009 MK telah menangani 3 kewenangan konstitusionalnya, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus perselisihan hasil pemilihan umum.



Sebagai dasar pelaksanaan kewenangannya tersebut adalah hukum acara yang diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) berfungsi sebagai pedoman beracara dan mengisi kekosongan pengaturan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. PMK dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang direncanakan terlaksana sebanyak 10 PMK/Juknis pada tahun 2009 hanya terealisasi sebanyak 9 PMK/Juknis. PMK yang belum terlaksana pada tahun 2009 adalah PMK tentang Penyempurnaan/Revisi PMI tentang Kuasa Pendamping. Draft dari PMK tersebut telah siap dibahas dan telah diprogramkan dalam Tahun Anggaran 2010.

Berikut di bawah ini beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah disempurnakan dan menjadi Peraturan MK di tahun 2009:

No	Peraturan MK	Tentang
1	PMK No. 16 Tahun 2009	Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2	PMK No. 17 Tahun 2009	Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3	PMK No. 18 Tahun 2009	Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik ( <i>electronic filing</i> ) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh ( <i>Video Conference</i> )
4	PMK No. 19 Tahun 2009	Tata Tertib Persidangan MK
5	PMK No. 20 Tahun 2009	Pedoman Penulisan Putusan
6	PMK No. 21 Tahun 2009	Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

Seiring dengan berjalannya waktu, PMK dan Juknis diselaraskan dengan perkembangan jaman sehingga tetap relevan dengan kebutuhan keadilan di masyarakat. PMK yang disempurnakan/direvisi di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

No	Penyempurnaan/Revisi PMK Tentang
1	Pedoman Beracara dalam Tentang Sengketa Lembaga Negara (SKLN)
2	Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
3	Penyempurnaan/Revisi PMK Produk Hukum MK
4	Penyempurnaan/Revisi PMK Tentang PPHU Legislatif
5	Penyempurnaan/Revisi PMK Tentang Pemberhentian Hakim dan Pergantian Antar Waktu
6	Penyempurnaan/Revisi PMK Tentang Pemilihan dan Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua

Selain PMK, MK juga menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Dalam tahun 2009 Juknis masih dalam bentuk final draft, belum dapat dijadwalkan karena jadwal agenda persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang cukup padat, namun draft Juknis tersebut sudah siap untuk dibahas dan diprogramkan di tahun 2010.

Berikut Juknis yang masih dalam bentuk draft untuk finalisasi adalah sebagai berikut:

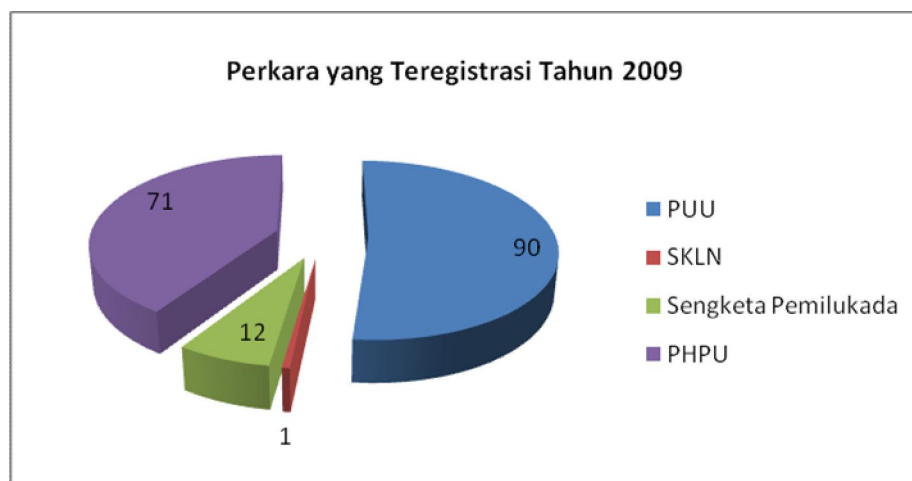
1. Penyusunan Juknis Administrasi Yustisial Pemilukada;
2. Panduan Pemeriksaan Setempat Pemilukada;
3. Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh; dan
4. Juknis tentang Tata Laksana Persidangan.

### 1.b Prosentase Jumlah Perkara Yang Diregistrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah perkara yang diregistrasi	<b>140 perkara</b>	<b>152 perkara</b>

MK memiliki kinerja yang baik karena realisasi yang melebihi target. Jumlah perkara yang direncanakan sebanyak 140 perkara di tahun 2009, ternyata melebihi target, yaitu sebanyak 152 perkara sehingga prosentase yang dicapai melebihi 100% yaitu 109%. Selama 2009, MK menerima permohonan yang memenuhi syarat administratif yaitu sebanyak 152 perkara. Perkara yang teregistrasi tersebut terdiri atas 90 perkara pengujian undang-undang, 71 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, 12 perkara sengketa Pemilukada, dan 1 perkara sengketa antar lembaga negara.

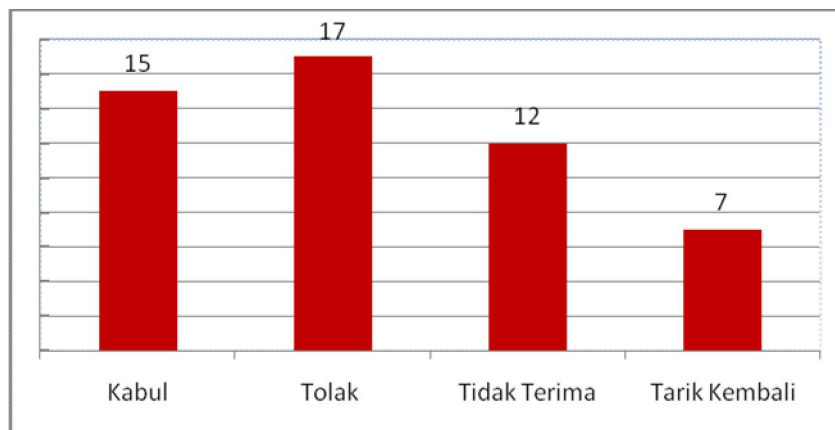
Selain memeriksa perkara yang didaftarkan pada tahun 2009, MK juga memeriksa perkara di tahun sebelumnya, yaitu 22 sisa perkara pengujian undang-undang di tahun 2008.



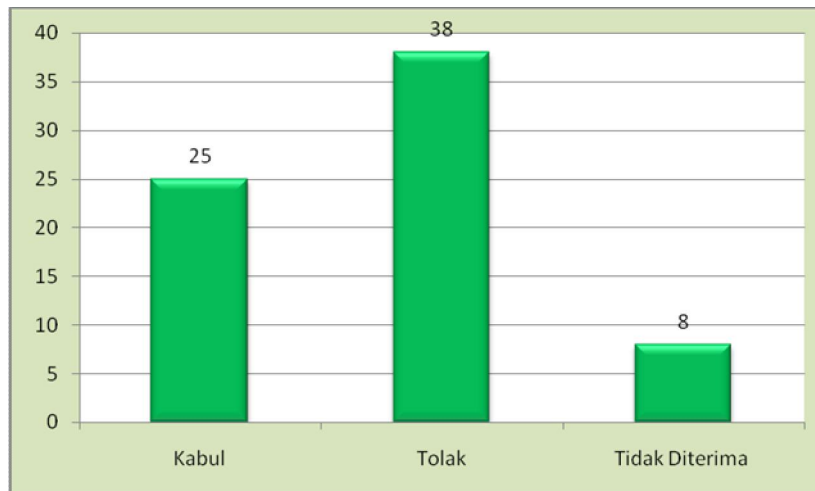
**1. c Prosentase Perkara yang diputus**

No	Kewenangan	Sisa thn lalu	Terima	Jumlah (3+4)	Putusan				Jumlah Putusan (6+7+8+9 =10)
					Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengujian Undang-undang	12	78	90	15	17	12	7	51
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1	-	1	-	-	1	-	1
3	Pembubaran Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Putusan Pendapat DPR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sengketa Pemilukada	9	3	12	1	10	1	-	12
6	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009		71	71	25	38	8	-	71
JUMLAH			152	174	41	65	22	7	135

Perencanaan perkara yang diputus di tahun 2009 adalah sebanyak 120 perkara. MK dengan menunjukkan kinerja yang terus meningkat dengan mengedepankan pelayanan administrasi perkara yang cepat, telah mencapai target melebihi sasaran semula, yaitu telah berhasil memutus sebanyak 135 perkara. Dengan rincian sebanyak 41 putusan dikabulkan, 65 putusan ditolak, dan 22 putusan tidak diterima.

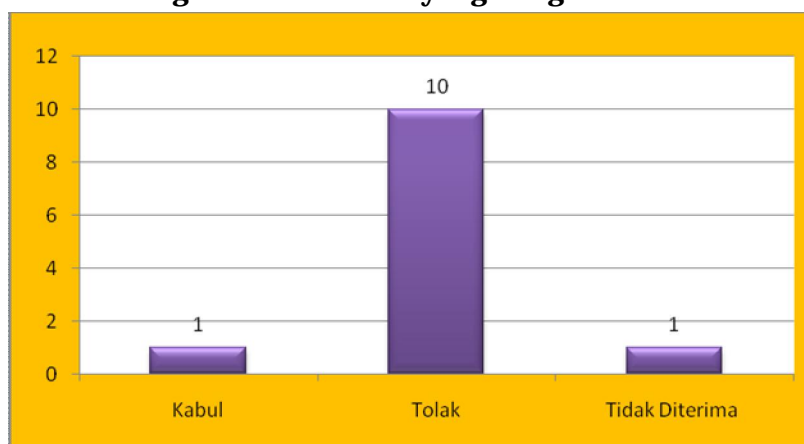
**Putusan Pengujian Undang-undang yang diregistrasi Tahun 2009**

Dari 90 perkara PUU yang ditangani MK pada tahun 2009, hanya sebanyak 51 perkara yang dapat diputus, sehingga menyisakan 39 perkara yang harus diselesaikan di tahun 2010. Perkara pengujian undang-undang MK menghasilkan 17 Putusan yang ditolak, 15 Perkara dikabulkan, sedangkan 12 perkara diputuskan tidak terima dan 7 perkara diputus untuk ditarik kembali.

**Putusan PHPU yang diregistrasi Tahun 2009**

Seperti grafik diatas, dari 71 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu yang diregistrasi pada tahun 2009, ada sebanyak 25 perkara yang dikabulkan, 38 perkara ditolak, dan terdapat 8 perkara yang diputus tidak diterima. Pada tahun 2009, MK telah memutus permohonan PHPU No. 108 dan 109/PHPU.B-VII/2008 pada 12 Agustus 2008 yang diajukan oleh pasangan Capres/Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-WIN) dan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (MEGA-PRO). Permasalahan kualitatif, yaitu kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), *regrouping* dan/atau pengurangan jumlah TPS, adanya kerjasama atau bantuan International Foundation for Electoral System (IFES), adanya berbagai pelanggaran pemilu dengan beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP” (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), namun bukan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif sehingga juga tidak menyebabkan Pemilu cacat hukum atau tidak sah.

Berkaitan dengan DPT yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK berhasil menetapkan perkara No. 102/PUU-VII/2009 ini, dengan mensyahkan KTP dan Paspor sebagai identitas pemilih.

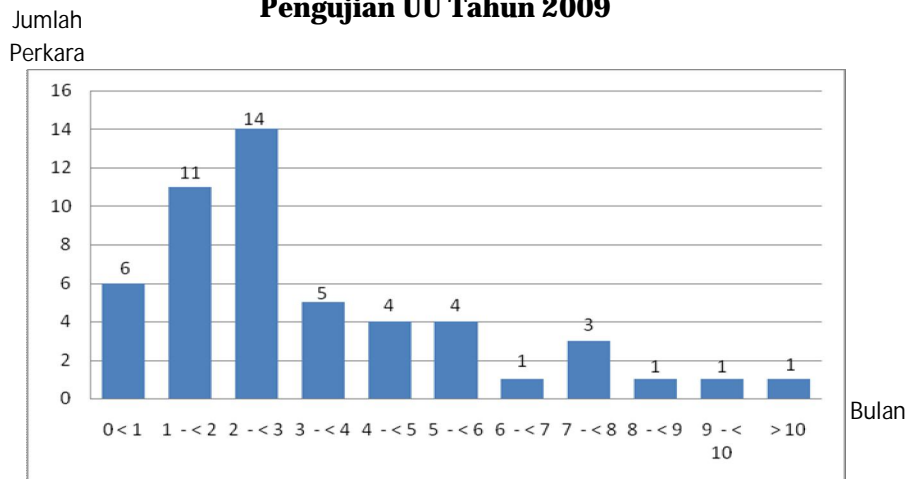
**Putusan Sengketa Pemilukada yang diregistrasi Tahun 2009**

Dari 12 perkara sengketa pemilukada yang diregistrasi sepanjang tahun 2009, MK memutuskan 1 perkara dikabulkan, 1 perkara tidak diterima dan 10 perkara ditolak.

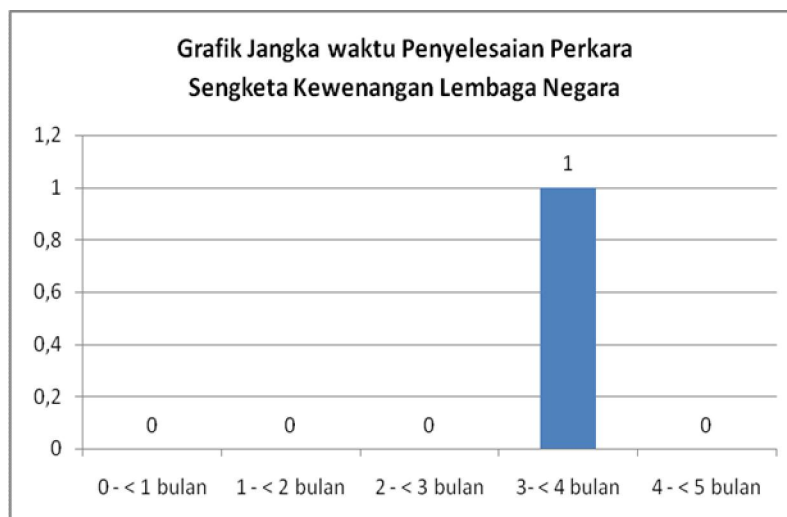
### 1.d Prosentase Jumlah Putusan Yang Tepat Waktu

Sepanjang tahun 2009, MK telah menyelesaikan perkara pengujian UU dan sengketa kewenangan lembaga negara. Penyelesaian perkara pemilu juga telah dihasilkan, mulai dari perkara sengketa hasil pemilukada, perselisihan hasil pemilu legislatif hingga perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengujian UU waktu penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan adalah sebanyak 6 perkara, sedangkan perkara yang selesai diuji dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan kurang dari 3 bulan adalah sebanyak 14 perkara. Pada tahun 2009, perkara yang banyak ditangani MK adalah perkara pengujian Undang-Undang, yaitu sebanyak 90 perkara dari 152 perkara yang terdaftar. Sebanyak 51 perkara yang dapat diputus di tahun ini. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah, 14 perkara dapat diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan dan 6 perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini menunjukkan MK mencapai prosentase ketepatan waktu perkara yang diputus.

**Grafik Jangka waktu Penyelesaian Perkara Pengujian UU Tahun 2009**



**Grafik Jangka waktu Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**



Untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 1 perkara dapat diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan dan kurang dari 4 bulan. Pencapaian kinerja MK dalam menyelesaikan

perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 perkara yang diregistrasikan dapat diselesaikan kurang dari 14 hari kerja. Untuk penyelesaian perkara hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, dimana terdapat 69 perkara yang diregistrasi, 42 dari partai politik dan 27 dari calon anggota DPD. Seluruh perkara tersebut dapat diputus dalam waktu 30 hari kerja sesuai ketentuan.

Dalam menerapkan asas peradilan cepat dan terpercaya, MK mengutamakan cepatnya penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan kualitas putusan karena merupakan dokumen negara dan bersifat final.

### **1. e Prosentase Pelayanan Sidang**

Kegiatan persidangan MK bersifat terbuka untuk umum, baik sidang pleno dan sidang panel. MK merencanakan 560 sidang yang diselenggarakan sepanjang tahun 2009. MK telah menggelar persidangan sebanyak 608 kali sidang. Tahun 2009 MK berhasil menunjukkan kredibilitasnya melindungi suara rakyat, dengan tuntas menyelesaikan carut marutnya sengketa yang terkait dengan hasil pemilu legislatif dan menjadi lembaga peradilan yang terpercaya memberikan solusi pada perselisihan Presiden dan Wakil Presiden.

## **2. Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Berfungsinya sistem informasi MK	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **2.a Fasilitas Video Conference (Persidangan Jarak Jauh)**

Komitmen MK lainnya adalah mempermudah masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dan beracara. Bahkan seluruh perkara MK dapat dimohonkan secara *online* melalui internet. Cukup dengan membuka *website* MK, kemudian “klik” fitur manajemen perkara, lalu dapat mendaftar perkara secara langsung. Tidak hanya pendaftaran perkara yang dilakukan secara *online*. Saat ini MK telah siap melaksanakan persidangan sengketa PHPU secara *online* melalui fasilitas *video conference*. MK juga tidak memungut biaya untuk fasilitas tersebut. MK memberikan kemudahan dengan terus memberikan bentuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Karena MK berlokasi di ibukota negara, Jakarta, maka pihak-pihak yang berperkara ketika terjadi PHPU tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta, sehingga terjadi efisiensi biaya dan waktu, dan persidangan jarak jauh dapat disaksikan pada waktu yang bersamaan ketika sidang tersebut berlangsung. Selain untuk persidangan jarak jauh, MK juga menyelenggarakan kuliah jarak jauh melalui fasilitas *video Conference (VC)*. Selama persidangan PHPU 2009, MK telah menggunakan fasilitas VC selama 72 kali. Dengan menggunakan fasilitas VC di 34 fakultas hukum Universitas Negeri di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, MK telah menambah 5 unit perangkat VC beserta genset yang ditempatkan di fakultas hukum Universitas Swasta yang ada

di provinsi baru setelah pemekaran, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya perselisihan hasil pemilukada di beberapa daerah di Indonesia.

Berikut rincian penggunaan *video conference* selama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di tahun 2009.

#### Daftar Penggunaan Video Conference PPHU Legislatif 2009

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Penggunaan VC
1	FH Universitas Haluoleo	6
2	FH Universitas Cendrawasih	6
3	FH Universitas Sumatera Utara	7
4	FH Universitas Pattimura	3
5	FH Universitas Mataram	3
6	FH Universitas Khairun Ternate	2
7	FH Universitas Andalas	3
8	FH Universitas Tadulako	3
9	FH Universitas Nusa Cendana	2
10	FH Universitas Lambung Mangkurat	2
11	FH Universitas Malikussaleh	6
12	FH Universitas Hasanuddin	6
13	FH Universitas Syiah Kuala	5
14	FH Universitas Jambi	1
15	FH Universitas Lampung	3
16	FH Universitas Trunojoyo	1
17	FH Universitas Diponegoro	1
18	FH Universitas Riau	2
19	FH Universitas Tanjung Pura	3
20	FH Universitas Airlangga	2
21	FH Universitas Sam Ratulangi	4
22	FH Universitas Bengkulu	1
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

#### 2.b Peradilan Berbasis ICT

Dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, MK telah memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology system/ICT*). Penyelenggaraan tugas dan kewenangan berbasis ICT ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di MK. Pemanfaatan ICT dapat menekan semaksimal mungkin interaksi yang bermuara pada jual beli perkara atau putusan. MK berupaya membuka *access to justice* yang seluas-luasnya.

Sepanjang 2009, MK terus menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Perkara atau Simpel (*Case Management System*) untuk mempermudah para pencari keadilan dalam memperoleh *access to justice* melalui aplikasi permohonan online.

### 2.c Fasilitas e-Kiosk

Salah satu Perkembangan Sistem Informasi MKRI di Tahun 2009 adalah fasilitas e-Kiosk. e-KIOSK adalah suatu bentuk fasilitas yang menyediakan sebuah wadah bagi masyarakat/tamu untuk mengakses berbagai fitur-fitur yang ada, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan manfaat nyata dari layanan prima oleh Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat yang dari hari ke hari makin ditingkatkan.

Bentuk *user-interface* dari e-Kiosk berupa layar sentuh berukuran 42 inchi yang dilengkapi berbagai menu-menu yang dapat dengan leluasa diakses oleh masyarakat/tamu. E-Kiosk ini didukung oleh sebuah Komputer Multimedia yang terletak di ruang kotak di bawah layar sentuh tersebut. Fitur-fitur yang ada pada e-Kiosk yang dapat diakses oleh masyarakat/tamu antara lain:

1. Seluruh fungsi website Mahkamah Konstitusi RI, termasuk link-link website/aplikasi intranet seperti Pusat Informasi Hukum, SIMPUS, dan SIMPEL.
2. Akses ke Live Sidang yang sedang berlangsung.
3. Akses ke file-file multimedia berupa foto dan video persidangan yang pernah berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI.

Jumlah e-Kiosk yang ada saat ini ada 2 unit, 1 unit berada di lantai dasar lobi dan 1 unit di lantai 4 (empat) di area wilayah Ruang Pengajuan Perkara. Dari waktu ke waktu, fitur-fitur pada e-Kiosk ini akan selalu dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan keadaan, sehingga diharapkan akan dapat semakin memudahkan masyarakat/tamu untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi RI.

### 3. Pengelolaan Kepegawaian yang Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
% Tersusunnya Dokumen Analisa Jabatan	100%	30%
% Tersusunnya Dokumen Assesmen Individu	100%	20%
% Tersusunnya Dokumen Sistem Penilaian Kinerja	100%	0%

Dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari hakim dalam bentuk dukungan administrasi dan yustisial, pegawai MK dituntut untuk memiliki kemampuan dan ketrampilan yang unggul, jiwa profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk itu MK selalu menerapkan kegiatan yang menunjang dan mengembangkan potensi pegawai.

Pada tahun 2009, MK mempunyai rencana untuk memiliki dan menerapkan sistem dalam kepegawaian dalam bentuk indikator tersusunnya: Dokumen Analisa Jabatan, Dokumen Assesmen Individu, dan Dokumen Sistem Penilaian Kerja. Pada Dokumen Analisa Jabatan diharapkan akan menghasilkan pola jenjang karir dari suatu jabatan, misalkan ketika seorang pegawai diterima di MK di suatu unit kerja/biro/pusat tertentu, pada tahapan berikutnya akan menjadi apa dan memerlukan waktu berapa lama akan jelas dipaparkan di dokumen analisa jabatan. Realisasi dokumen analisa jabatan ini belum maksimal, masih dalam bentuk draf baru



mencapai tingkat 30% dari yang diharapkan. Hal ini tidak berbeda jauh pada indikator tersusunya dokumen assesmen individu. Selama tahun 2009, assesmen/penilaian evaluasi terhadap individu pegawai hanya dijadikan untuk keperluan temporer saja, tidak komprehensif dan belum diimplementasikan kepada seluruh pegawai. Demikian halnya juga pada indikator tersusunya dokumen sistem penilaian kinerja, belum sama sekali dilakukan pada tahun 2009 karena MK sedang melakukan pembenahan pada sistem struktur organisasi dan tata laksana (ORTALA) sehingga diharapkan pada tahun 2010 dapat selesai dan direncanakan dapat lebih efektif dan efisien.

#### 4. Terlaksananya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja MK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Renstra 2010-2014	1 dokumen	1 dokumen

MK sebagai lembaga negara senantiasa memberikan upaya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif. MK juga sebagai organisasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan MK.

Indikator yang mendukung terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan MK adalah Renstra 2010-2014. MK telah berhasil mempunyai Rencana Strategis 5 tahun ke depan yaitu untuk kurun waktu tahun 2010- tahun 2014.

Selain Indikator Kinerja Utama yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula indikator sasaran lain yang bukan termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijelaskan melalui kegiatan pada setiap Biro/Pusat yang ada di Mahkamah Konstitusi.

#### ✓ LAKIP BIRO UMUM

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	
1	2	3	4	5	
1	<b>SDM yang profesional berintegritas dan berbasis kompetensi</b>	1	Persentase pegawai yang telah mengikuti Diklatpim I - IV	80%	37%
		2	Rasio Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis sesuai dengan kompetensi tugas	80%	108%
		3	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat prajabatan	80%	100%
		4	Persentase Pendidikan formal yang diperoleh pegawai dalam jumlah susunan jabatan dan syarat jabatan	80%	19%

2	Pengelolaan kepegawaian yang profesional	1	Dokumen Reformasi Birokrasi:	80%	
		-	Dokumen Analisa Jabatan		30%
		-	Dokumen Assesmen Individu		20%
		-	Dokumen Sistem Penilaian Kinerja		0%

### SDM yang profesional berintegritas dan berbasiskan kompetensi

Sejak berdiri hingga usia enam tahun, MK selalu berusaha menjadi lembaga peradilan yang menerapkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi. Prinsip profesional yang diterapkan MK mengandung pemahaman bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan dan keahlian yang tepat sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Tidak hanya itu, MK juga selalu berusaha mewujudkan SDM yang profesional berbasis kompetensi dan berintegritas tinggi. Guna mewujudkan itu semua, selama 2009 melanjutkan tahun-tahun sebelumnya, berbagai strategi kebijakan peningkatan SDM pun dilakukan MK, di antaranya penyusunan analisis kebutuhan SDM, rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan mekanisme yang adil, jujur, dan transparan yang dilengkapi dan didasarkan pada analisis jabatan yang komprehensif serta penegakan Kode Etik pegawai.

Pada tahun 2009, Diklat Pimpinan I- IV hanya terealisasi sebesar 37%, diklat pimpinan II tidak ada, diklat pimpinan tingkat III sebanyak 2 orang, sedangkan diklat pimpinan IV sebanyak 5 orang. Diklat prajabatan untuk CPNS sebanyak 20 orang telah 100% dilaksanakan pada Oktober 2009.

### Pengelolaan kepegawaian yang profesional

Pada periode 2009, bangsa Indonesia memiliki satu agenda besar bersama yang melibatkan hampir seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki bangsa ini, yakni pemilihan umum (pemilu) legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga negara dan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memutus perselisihan atas hasil pemilu, pada 2009 menjadi salah satu fokus perhatian utama publik dan bangsa Indonesia. Mengingat peran yang demikian sentral dalam mengatasi berbagai persoalan pemilu, MK dituntut untuk mampu menjalankan kewenangan tersebut serta bertindak secara adil, transparan, dan profesional. Pada posisi inilah, dukungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK memegang peran yang sangat krusial dan penting bagi kelancaran pelaksanaan kewenangan MK oleh para Hakim Konstitusi.

Dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel. Sepanjang 2009, berbagai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya secara umum telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan. Dukungan terhadap pelaksanaan MK dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU), baik legislatif maupun pilpres, dapat dianggap telah memenuhi target pencapaian sebagaimana yang sebelumnya telah direncanakan. Namun demikian, di balik keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak potensi dan sumber daya yang belum tereksplorasi secara optimal. Adanya program kerja yang memiliki tingkat realisasi di bawah rata-rata menjadi salah satu bukti perlunya optimalisasi sumber daya dan potensi yang dimiliki MK. Salah satu program yang perlu optimalisasi pada masa yang akan datang karena tingkat pencapaian realisasinya sangat rendah adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat SDM merupakan organ utama yang menopang kesinambungan organisasi, perlu upaya yang lebih serius untuk mengoptimalkan pencapaian target sebagaimana yang telah direncanakan.

Pencapaian target program Pengelolaan SDM yang di luar harapan sesungguhnya tidak semata karena kegagalan dalam perencanaan. Faktor eksternal dan kondisi lingkungan organisasi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan kepada tingkat pencapaian keberhasilan program kerja. Selama 2009, hampir seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki MK diarahkan untuk mendukung pelayanan pelaksanaan kewenangan MK dalam memutus perkara PHPU. Dampak dari hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk pelaksanaan program pengelolaan SDM menjadi tertunda dan dialihkan pada periode berikutnya.

#### **Rincian Realisasi Diklat Teknis Di Tahun 2009**

<b>NO</b>	<b>Nama Kegiatan Diklat/Training</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PENYELENGGARA/TEMPAT</b>
1	Sistem Akuntansi Instansi	20 - 23 April 2009	Ditjen Perbendaharaan, Hotel Griya Astuti, Cisarua
2	Diklat DTSS Bendahara Pengeluaran	9-24 Februari 2009	BPPK Depkeu, Pusdiklat Anggaran Ciawi
3	Magang dan Penelitian di High Court of Australia	16 Pebruari - 18 Maret 2009	High Court of Australia, IALDF
4	Training "IBM Lotusphere Comes to You 2009"	26 Februari 2009	IBM, Indonesia Room, Shangrila Hotel
5	Lokakarya Tata Naskah Dinas	15 - 16 April 2009	Menegpan, Hotel Goodway, Batam
6	Diklat Pengawasan Kearsipan	2-7 Maret 2009	ANRI, Pusdiklat Kearsipan, Bogor
7	Diklat Manajemen Arsip Dinamis	30 Maret - 4 April 2009	ANRI, Hotel Grand Kemang
8	Penyusunan Silabi Diklat Nasional Depdiknas	2-6 Pebruari 2009	Depdiknas, Hotel Mega Anggrek Jakarta

**LAKIP**

**2009**

9	Seminar "Information Security Day 2009"	19 Maret 2009	Inixindo, The Executive Club, Sultan Htl
10	Workshop "Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik"	19 - 20 Maret 2009	Depkominfo, Hotel Millenium Jakarta
11	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	16 s.d. 25 Maret 2009	Pusdiklat BKN, Hotel Indo Alam - Cipanas
12	BIMTEK LHKPN Sosialisasi Gratifikasi	24 Februari 2009	KPK, Gedung KPK, Jakarta
13	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara	20 - 23 April 2009	Ditjen Perbendaharaan, Hotel Griya Astuti, Cisarua
14	Diskusi Publik "Tantangan Bantuan Hukum Probono Pasca PP No. 83 Tahun 2008"	3 Maret 2009	Komisi Hukum Nasional, Hotel Millenium Jakarta
15	<i>International Training Programme in Legislative Drafting</i>	13 Januari - 13 Pebruari 2009	New Delhi, India
16	Magang Panitera Pengganti	Januari s.d. Maret 2009	MKRI, Ruang Sidang MKRI
17	Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 kepada Pengurus Parpol dan Calon DPD	24 Februari 2009	KPU Kota Bekasi, Hotel Horison Bekasi
18	Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Indonesia	3-4 Februari 2009	Komnas Perempuan, Hotel Harris Jakarta
19	FGD "Bagaimana mengimplementasikan UU Pornografi?"	19 Februari 2009	Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta
20	Semiloka "Kesiapan Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang KIP"	4 - 5 Maret 2009	Indonesian RDI, Hotel Millenium
21	Kursus Bahasa Inggris "Language & Literacy Classes"	1 April 2009 s.d. 2011	Anglicare, Dixon House, Australia
22	Rintisan Gelar S-2 Hukum (Master of Law)	1 Juni 2009 s.d. Januari 2011	University of Melbourne, Australia
23	Bimtek Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP)	8 - 10 Juni 2009	Depkominfo - Ditjen Aplikasi Telematika, Hotel Acacia - Jakarta
24	Diklatpim III	27 Juli - 10 September 2009	BPS, Pusdiklat BPS Jagakarsa
25	Diklat Manajemen Tim Penilai Arsiparis	3 - 8 Agustus 2009	ANRI, Hotel Permata, Bogor
26	Diklat Penyusunan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	12 - 13 September 2009	Departemen Keuangan / Ruang Press Conference Lt. IV
27	Inhouse Training Sistem Akuntansi Instansi	14 - 15 September 2009	Departemen Keuangan / Ruang Press Conference Lt. IV
28	The 6th Regional Conference of Asian Constitutional Court Judges	24 - 28 September 2009	MK Mongolia, KBRI China
29	Diklatpim IV Ang. 52	28 September - 5 November 2009	Pusdiklat BPS
30	Sosialisasi Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 3 & 10 Thn 2009	1 Oktober 2009	ANRI / Hotel Maharaja
31	Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian Angkatan II	1 - 29 Oktober 2009	Pusdiklat ANRI, Bogor
32	Diklatpim III	5 Oktober - 20 November 2009	Pusdiklat Aparatur Perhubungan Dephub

**LAKIP****2009**

33	Diklat Penyuluh Minat dan Gemar Baca	5 - 13 Oktober 2009	Pusdiklat Perpusnas RI
34	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat I (IPS)	8-28 Oktober	Pusbindiklat LIPI
35	Diklat Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	12 - 16 Oktober 2009	Pusdiklatwas BPKP
36	Diklatpim IV Angk. 53	12 Oktober - 19 November 2009	Pusdiklat BPS
37	Diklat Prajabatan Golongan III CPNS 2008	12 - 25 Oktober 2009	Pusdiklat Kepegawaian BKN/ Pusdiklat Pegawai MKRI Bekasi
38	Diklat Prajabatan Golongan II CPNS 2008	20 - 31 Oktober 2009	Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Dephan
39	Seminar bersama Mario Teguh	23 Oktober 2009	PT. Exnal Limarindo Mandiri / Aula Lt. Dasar
40	Diklat Pengelolaan Informasi	19 - 28 Oktober 2009	Pusdiklat Perpusnas RI
41	Diklat DTSS Pengelolaan APBN Angk. II	19 Oktober - 10 Nopember 2009	Pusdiklat Anggaran BPPK, Ciawi
42	Sosialisasi Pedoman Audit Komprehensif SPI di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MKRI	24 - 25 Oktober 2009	Ruang Diklat Lantai VIII
43	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat I (IPS)	2-21 November 2009	Pusbindiklat LIPI
44	Diklat Pengenalan dan Pengelolaan Perpust.	2 - 5 November 2009	Pusdiklat Perpusnas RI
45	Diklat Budaya Kerja (Outbond)	6-8 November 2009	Brata Indonesian Adventure/ Caldera Resort, Citarik-Sukabumi
46	Hadad Alwi dan ESQ	6-7 November	Brata Indonesian Adventure/ Caldera Resort, Citarik-Sukabumi
47	Diklat Penelusuran Informasi	9-10 November 2009	PDII LIPI/ Jl. Gatot Subroto Kav. 10
48	Diklat Analisis Informasi	11-13 November 2009	PDII LIPI/ Jl. Gatot Subroto Kav. 10
49	Katalogisasi Berkomputer	16 - 20 November 2009	PDII LIPI/ Jl. Gatot Subroto Kav. 10
50	Diklat Alih Media	24-26 November 2009	PDII LIPI/ Jl. Gatot Subroto Kav. 10
51	Katalogisasi Lanjut	7 - 19 November 2009	PDII LIPI/ Jl. Gatot Subroto Kav. 10
52	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	21-22 dan 24 November 2009	LKPP/Gd. MK RI, R. Diklat Lantai 8
53	Lokakarya Tata Naskah Dinas Elektronik	22 - 24 November 2009	Menpan RI/ Hotel Inna Putri Bali, Kawasan BTDC Nusa Dua, Bali
54	Diklat Penanganan Bencana	5 - 6 Desember	Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta
55	Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa	07 Desember 2009	LKPP, Gd. MKRI Lantai Dasar
56	Pelatihan Basic Trauma & Cardiac Life Support	8- 12 Desember 2009	Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118
57	Celebration and Appreciation Night	8- 12 Desember 2009	Legal Development Facility (LDF), Hotel The Ritz Carlton Kuningan
58	Konfrensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-2	10 s.d. 12 Desember 2009	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Hotel Millenium Sirih
59	Orientasi CPNS 2009	12-13 Desember 2009	Bagian Kepegawaian
60	Bahasa Inggris	September s.d. Desember	International Language Program (ILP), Gd. MKRI, Ruang Diklat Lantai 8
61	Rintisan Gelar	Januari s.d. Desember	Bagian Kepegawaian

Seperti pada tabel diatas yang memberikan rincian informasi tentang pendidikan dan latihan teknis untuk pengembangan pegawai di MK yang menjadi aset MK di tahun 2009 ini dan masa datang.

#### ✓ LAKIP BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi
1	2	3	4	
1	Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK	1 Berfungsinya sistem informasi MK	8 Sistem	8 Sistem
2	Terjalannya Kerjasama dengan Lembaga Eksternal	1 Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan FH PT	34 MoU	34 MoU
		2 Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan Pusat Kajian Konstitusi/Organisasi kemasyarakatan/Pemda	56 MoU	71 MoU
3	Tersosialisasinya isu konstitusi dan keberadaan Mahkamah Konstitusi	1 Jumlah forum komunikasi tatap muka	59 Forum	142 forum
		2 Jumlah program siaran interaktif melalui media elektronik	2 Media	36 Media
		3 % Putusan MK yang dipublikasikan melalui media massa dan website	100%	40%
		4 Jumlah jenis publikasi MK yang didistribusikan ke masyarakat	31 Buku	21 Buku
4	Terciptanya pelayanan bagi kegiatan pimpinan	Terselenggaranya kegiatan protokoler dan tata usaha pimpinan MK	12 Bulan	12 bulan

#### Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK

Pada 2009, MK menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif dan Pilpres 2009. Untuk memenuhi kebutuhan proses peradilan yang cepat (speedy trial) seperti PHPU, MK menggunakan fasilitas video conference (vicon) yang diresmikan sejak 18 Desember 2008.

Selama persidangan PHPU 2009, MK telah menggunakan teknologi ini di 22 dari 34 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia dengan jumlah persidangan sebanyak 72 persidangan. Video conference mempermudah pihak yang berperkara dalam hal memberikan keterangan saksi maupun ahli yang berada jauh di daerah-daerah, meminimalisasi biaya transportasi, serta mempercepat poses persidangan PHPU yang memang dibatasi 30 hari kerja untuk PHPU legislatif dan 14 hari kerja untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hingga akhir 2009, MK juga telah berhasil menambah 5 (lima) titik baru penempatan fasilitas video

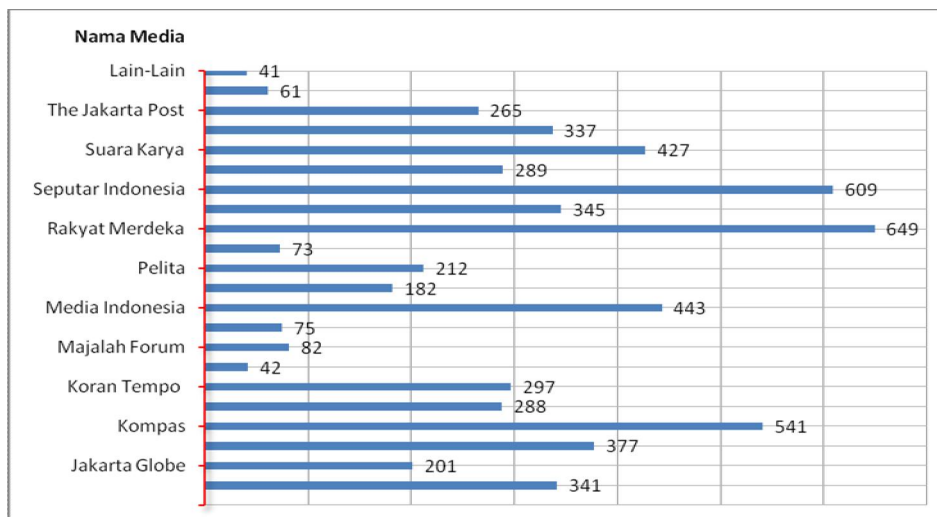
conference di lima provinsi baru hasil pemekaran. Hal ini merupakan upaya MK untuk terus mengembangkan kemudahan akses serta keterbukaan proses persidangan di MK hingga seluruh pelosok Indonesia.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya, MK juga menerapkan sistem administrasi umum berbasis teknologi. Sistem yang hingga kini masih dikembangkan meliputi Sistem Informasi Manajemen Disposisi Elektronik (Simdok), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Realisasi Anggaran (Simtor), dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simpus) berupa pelayanan perpustakaan dan katalog online. Pengembangan sistem administrasi umum berbasis teknologi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi, administrasi umum bisa ditata dengan baik dan terarah, serta implementasi setiap program sudah tersistem dengan baik. Pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu jalan untuk melayani masyarakat.

Menurut Koncaid & Schramn menyatakan komunikasi sebagai sebuah proses, artinya komunikasi merupakan proses berbagi/menggunakan sebuah informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi tersebut dinamakan komunikasi. Ciri adanya proses komunikasi menurutnya adalah : Harus ada 2 pihak atau lebih, dan ada proses berbagi informasi, sehingga harus selektif dalam memilih alat komunikasi dan memilih pola yang sesuai untuk menggambarkan pikiran. Oleh sebab itu penting sekali peran dari media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat

Tumbuh dan berkembangnya MK menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya tidak lepas dari peran serta dan dukungan media massa sebagai penyambung mata dan lidah publik. Peran media sebagai salah satu instrumen penyebaran informasi sekaligus kontrol sosial menjadi sangat penting bagi MK mengingat keberadaan MK yang secara faktual masih relatif baru. Peran penting itulah yang sangat disadari MK sehingga sepanjang 2009 berbagai kerja sama telah dijalin antara MK dengan media massa.

**Rekapitulasi Media Monitoring Selama Tahun 2009**



Selama ini, MK terus menjalin hubungan baik dengan media massa (pers) sebagai mitra kerjasama, khususnya media cetak dan elektronik. Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial yang juga dapat digunakan untuk pemenuhan hak masyarakat dalam mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. MK menyadari bahwa pers mampu menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, MK senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan insan pers yang ada di negeri ini. Sepanjang tahun 2009, MK telah diliput oleh 22 media cetak, dengan pemberitaan tentang MK sebanyak 6.177 berita.

### **Terjalinnnya Kerjasama dengan Lembaga Eksternal**

Salah satu bentuk kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara MK dan media massa adalah pemuatan putusan MK pada berbagai media cetak nasional. Sehari setelah vonis putusan dibacakan oleh MK, melalui insan pers terutama media cetak serta media elektronik, masyarakat dapat mengakses dan kemudian membaca putusan MK secara lengkap dan komprehensif.

Mengingat peran dan dukungan yang sangat strategis tersebut maka untuk mempermudah akses para jurnalis terhadap aktivitas MK dan menunjang kinerja jurnalis yang bekerja meliput berbagai kegiatan, MK telah menyediakan *Media Center* yang mudah dijangkau dan dimanfaatkan para pekerja media. Kenyamanan bagi pers juga menjadi perhatian dengan pelayanan petugas humas yang ramah sehingga aktivitas MK, baik yang berkaitan dengan proses peradilan maupun kegiatan lainnya, dapat segera disebarluaskan dalam waktu cepat. Untuk itu, pada 2009 MK telah melengkapi fasilitas Media Center bagi para wartawan tersebut dengan 20 unit personal komputer lengkap dengan jaringan internet selama 24 jam. Para insan pers juga dapat memanfaatkan fasilitas internet tanpa kabel (*wi-fi*) untuk menunjang mobilitas mereka meliput di lingkungan MK

Sebagai institusi yang relatif masih baru dan memiliki daya jangkau yang terbatas, MK mengembangkan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat, lembaga negara, serta insan pers guna mewujudkan misi “Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi”. Pada 2009, MK telah mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat hingga perguruan tinggi dan guru.

Di antara aspek yang hendak dicapai melalui pengembangan kerja sama MK dengan berbagai pihak ini yaitu diharapkan semakin dikenalnya MK di tengah masyarakat. Selain itu, kerja sama dibutuhkan untuk memperkuat dan menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan tujuan negara serta terkait dengan tugas dan wewenang MK untuk ikut mengambil tanggung jawab membangun budaya sadar berkonstitusi di semua kalangan.



Salah satu bentuk kerja sama MK dengan lembaga negara antara lain adalah kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Presiden pada Agustus 2009. Kerja sama MK dan KPU serta KPU berbagai daerah sangat dibutuhkan sehingga persidangan hasil Pemilu dapat berjalan lancar, tertib, dan mengarah pada pencapaian tujuan. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui kegiatan temu wicara hukum acara MK untuk memberikan pemahaman kepada para pengurus KPU perihal pedoman beracara perkara PPHU di MK.

Pada 9 Oktober 2009, MK juga telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). Kerja sama yang dijalin tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di lingkungan Depdiknas dan Depag serta pemilihan guru PKn berprestasi tingkat nasional. Melalui program ini juga diharapkan akan tumbuh kesadaran berkonstitusi pada level yang lebih jauh, yakni anak didik sebagai cadangan keras (*iron stock*) masa depan bangsa Indonesia.

### **Terciptanya pelayanan bagi kegiatan pimpinan**

MK melalui kegiatan para hakim MK, selain memutuskan perkara, juga melakukan kegiatan meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, MK RI tidak dapat lepas dari pergaulan dan keterpengaruhan oleh berbagai negara lain. Selain itu, sebagai lembaga baru MK juga menyadari bahwa kita perlu menimba pengetahuan dan informasi dari lembaga-lembaga sejenis yang sudah lebih dahulu berdiri. Untuk itu, selama 2009 MK telah mulai menjalin berbagai kerja sama secara intensif dengan MK negara lain maupun dengan lembaga studi dan lembaga hukum internasional lainnya. kerjasama dengan kalangan dunia internasional menunjukkan eksistensi MK sekaligus membuka peluang terjadinya pertukaran informasi antar negara yang bermanfaat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan MK.

Tanpa disadari, meskipun MK RI baru berusia relatif muda dibandingkan dengan MK negara lain namun kiprah dan perannya telah diakui oleh berbagai institusi luar negeri. Di antara pengakuan tersebut adalah keikutsertaan MK RI dalam berbagai ajang forum MK internasional, baik regional se-Asia maupun global sedunia. Pada forum konferensi MK sedunia yang digelar pada 23-24 Januari 2009 di Cape Town, Afrika Selatan, MK RI yang diwakili oleh Ketua MK dipercaya menjadi pemakalah dan pembicara di hadapan para hakim dari berbagai negara di dunia. Bahkan pada konferensi MK se-Asia yang digelar di Ulanbaatar, Mongolia, pada 24-29 September 2009 MK RI telah diputuskan untuk menjadi penyelenggara pelaksana konferensi MK se-Asia sekaligus tuan rumah pembentukan asosiasi MK se-Asia. Menurut rencana, konferensi yang akan digelar pada Juli 2010 nanti, juga tidak hanya dihadiri oleh MK negara-negara di Asia namun juga perwakilan MK dari berbagai benua, yakni Eropa, Afrika, serta Amerika Selatan.

Selain secara multilateral, MK RI juga menjalin hubungan dengan berbagai lembaga peradilan negara lain secara bilateral. Pada 2009, MK telah mengirimkan beberapa orang staf ke berbagai negara untuk studi banding dan belajar mengenai sistem peradilan ataupun sistem kenegaraan negara tersebut. Beberapa di antara kerja sama tersebut antara lain MK

mengirimkan pegawai untuk magang di Federal Court of Australia dan High Court of Australia serta Lok Sabha (Dewan Rakyat) di India. Tidak hanya itu, pada 2009 Ketua MK dan para Hakim Konstitusi juga kerap menghadiri undangan dari berbagai lembaga hukum dan peradilan di negara lain di seluruh dunia. Misalnya, MK RI menerima undangan dari Mahkamah Agung (MA) RRC, MA dan MK Republik Federal Jerman, MK Spanyol, serta negara-negara lainnya untuk bertukar informasi mengenai aktivitas masing-masing lembaga.

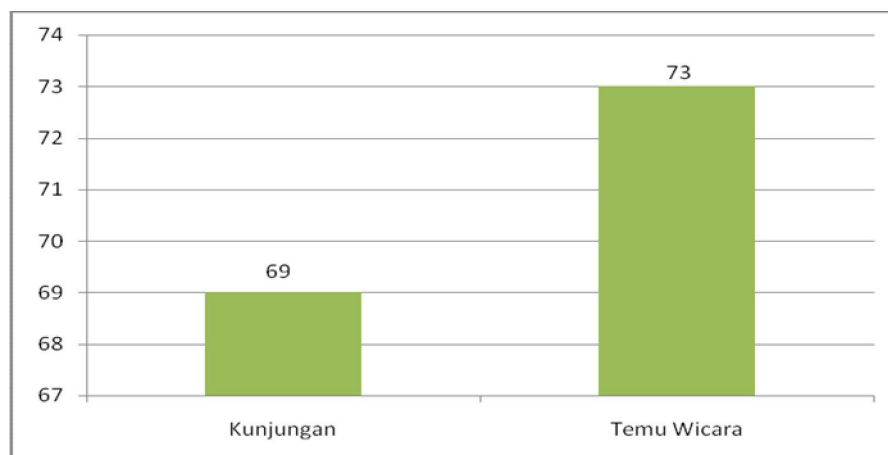
Sementara hubungan MK RI dengan berbagai instansi nonpemerintahan internasional juga semakin meningkat. Dua lembaga nonpemerintahan internasional di bidang hukum yang secara kontinyu menjalin kerja sama dengan MK RI adalah Hanns Seidel Foundation (HSF) dan Konrad Adeneaur Stiftung (KAS).

Dari berbagai hubungan tersebut, peran dan eksistensi MK RI dalam pengembangan hukum serta peradilan di dunia telah diakui oleh negara-negara lainnya.

Selama tahun 2009, MK telah mengadakan temu wicara dan sosialisasi tentang Mahkamah Konstitusi baik di Jakarta, maupun di daerah. Pada awal tahun 2009, kegiatan temu wicara banyak berbicara tentang perselisihan hasil pemilu. Pemahaman konstitusi juga disosialisasikan kepada kaum pelajar Sekolah Menengah Atas dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk menanamkan pengetahuan sejak dini, kesadaran dan pada akhirnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban konstitusi warga negara. MK telah melaksanakan temu wicara sebanyak 73 kali sepanjang tahun 2009 dan 69 kali kunjungan. Kegiatan kunjungan dilaksanakan di Jakarta, luar kota, maupun di luar negeri. MK telah melebihi target sebesar 142 kali forum pertemuan untuk meningkatkan kesadaran konstitusi warga negara Indonesia.

### **Grafik Temu Wicara dan Kunjungan**

#### **Tahun 2009**



### Tersosialisasinya isu konstitusi dan keberadaan Mahkamah Konstitusi

MK telah mencapai kinerja yang sangat baik karena telah banyak mengadakan forum komunikasi tatap muka yang semula ditargetkan sebanyak 59 forum, tahun 2009 MK telah menyelenggarakan 142 forum, baik dalam bentuk temu wicara dan Focus group Discussion. Pada tanggal 6-7 Maret, MK mengadakan temu wicara dengan TNI Angkatan Udara tentang Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Bagi Perwira TNI Angkatan Udara di Grand Ball Room, Hotel Sultan Jakarta, dengan dihadiri oleh 162 peserta. Selain di dalam negeri, MK juga melakukan sosialisasi sadar berkonstitusi dengan menggelar temu wicara dengan warga negara Indonesia dan pelajar Indonesia di Beijing, China pada tanggal 27 September 2009, dengan dihadiri oleh 200 orang. Selain dalam bentuk temu wicara, MK juga dengan diwakili oleh Hakim Konstitusi mengikuti Konferensi Hakim Konstitusi se-Asia kerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) pada tanggal 23-26 September 2009 di Hotel Kempinski, Mongolia.

Jumlah jenis publikasi yang dihasilkan selama tahun 2009 yang semula ditargetkan sebanyak 31 jenis buku, hanya mencapai 21 jenis buku saja. Jenis buku yang tidak dicetak di tahun 2009 adalah booklet MK, Buku Putusan MK, Buku Kumpulan Putusan, Buku Kompilasi Konstitusi, Buku Naskah Konstitusi, Buku Naskah Komprehensif UUD, Buku Risalah Sidang, Buku Sinopsis Putusan, Buku Himpunan PMK, Buku Informasi Gedung MK dan Buku Huku Acara MK, dimana kesepuluh buku tersebut akan direncanakan dicetak di tahun 2010.

Jenis Buku	Satuan	Target	Capaian
Jurnal MK	Eksemplar	9000	8.000
Majalah Konstitusi	Eksemplar	24000	21.000
Booklet MK	Eksemplar	1450	0
Leaflet/poster MK	Eksemplar	35000	30.000
UUD 1945/UU 24 thn 2003 (ind)	Eksemplar	36250	35.000
UUD 1945/UU 24 thn 2003 (eng)	Eksemplar	10000	1.000
Profil Hakim	Eksemplar	15000	6.000
Buku Karya Hakim	Eksemplar	7150	2.000
Buku Prosiding/seminar	Eksemplar	1500	1.000
Buku putusan MK	Eksemplar	5000	0
Buku 6 Tahun MK	Eksemplar	2600	900
Buku Kumpulan Putusan	Eksemplar	1000	0
Buku Kompilasi Konstitusi	Eksemplar	100	0
Buku PKB	Eksemplar	18500	4.000
Buku naskah komprehensif UUD	Eksemplar	677	0
Buku Risalah sidang	Eksemplar	615	0
Buku Hukum dan konstitusi	Eksemplar	1000	1.000
Buku Sinopsis Putusan	Eksemplar	2000	0
Buku Himpunan PMK	Eksemplar	2500	0
Buku informasi gedung MK	Eksemplar	1000	0
Laporan Tahunan (ind)	Eksemplar	1600	1.000
Buku Lima Tahun MK	Eksemplar	1100	500
Buku Hukum Acara MK	Eksemplar	10240	0
Kalender dinding	Eksemplar	5600	1.250

Jenis Buku	Satuan	Target	Capaian
Kalender Meja	Eksemplar	4000	2.000
Buku Kerja	Eksemplar	4920	1.250
Buku Profil MK	Eksemplar	3800	17.000
PMK PHPU	Eksemplar	3800	7.000
Pedoman Beracara PHPU	Eksemplar	3000	7.000
Buku Pintar PHPU	Eksemplar	7500	1.500
Syarah UUD 1945	Eksemplar	2000	3.000

#### ✓ PUSAT PENELITIAN DAN KAJIAN

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	
1	2	3	4	5	
1	Tersedianya materi substantif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK	1	Laporan penelitian	2 Laporan	
		2	Kajian Perkara	2 Laporan	50%
		3	Penyelenggaraan seminar tentang hukum dan konstitusi	9 Kegiatan	
2	Persentase referensi tentang hukum dan konstitusi	4	Pustaka Konstitusi	2 Laporan	50%

#### **Tersedianya materi substantif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penafsiran tunggal dari konstitusi (the final interpreter of the constitution). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, MK memerlukan sebuah iklim akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan. Untuk itu, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan, konstitusi dan demokrasi, serta pelayanan publik, MK tidak lupa membangun budaya penelitian dan pengkajian guna mendukung aktivitas Hakim Konstitusi. Hasil kegiatan penelitian dan pengkajian ini kemudian diposisikan sebagai masukan dan referensi Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menjaga independensi.

Beberapa penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan MK pada 2009 misalkan mengenai "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Hukum Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Perbandingan dengan Praktik yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan)". Penelitian ini berupaya memberikan pengetahuan eksplanatoris teoritis mengenai pengaduan konstitusional dari perspektif negara hukum. Selain itu, dilaksanakan pula penelitian dan pengkajian antara lain terkait Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Sisdiknas (Badan Hukum Pendidikan). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui landasan filosofis diterbitkannya perundang-undangan tersebut sekaligus juga menggali informasi potensi masalah yang muncul kemudian pada level implementasi.

Penerbitan Pustaka Konstitusi dalam berbagai buku juga merupakan salah satu bentuk penelitian dan pengkajian yang dilakukan MK selama 2009. Melalui pustaka konstitusi ini, MK memiliki peran strategis bagi pengembangan ilmu bagi masyarakat. Tidak banyak lembaga maupun institusi negara yang mencoba meletakkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan kelembagaannya. Pada 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dan juga Konstitusi Press (Konpress) telah menerbitkan beberapa buku mengenai isu-isu ketatanegaraan, konstitusi, demokrasi dan pemilihan umum. Ikhtiar ini tak kalah penting karena turut pula membangun kesadaran berkonstitusi. Penerbitan pustaka di MK secara ilmiah bertemakan konstitusi, hukum tata negara, dan hukum acara MK.

MK juga telah membukukan dan menerbitkan kompilasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif, presiden dan wapres, maupun kepala daerah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat untuk mengetahui pedoman beracara seputar perkara PPHU di MK.

Dalam perjalanannya, MK juga menerbitkan *Majalah Konstitusi* yang terbit setiap satu bulan sekali serta *Jurnal Konstitusi* MK telah terbit sebanyak 4 kali selama 2009. *Majalah Konstitusi* dan *Jurnal Konstitusi* bertujuan pula untuk "membangkitkan" konstitusi serta menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi menyatu dengan kehidupan masyarakat (*to enforce the constitution as a living constitution*).

Dalam bidang akademis, MK juga telah menginisiasi penyusunan silabus mata kuliah hukum acara MK bagi para mahasiswa hukum melalui *workshop* yang diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi pengajar hukum acara MK pada 13-15 November 2009. Hasil *workshop* tersebut kemudian disampaikan pada forum pertemuan koordinasi MK dengan Fakultas Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia.

✓ **BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Mahkamah Konstitusi RI	1	Tingkat ketersediaan perolehan Anggaran	100%	100%
		2	Renstra 2010-2014	1 Dok	1 Dok
		3	Opini Laporan keuangan	WTP	WTP
		4	Laporan Evaluasi	4 Lap	4 Lap
		5	LAKIP 2008	1 Lap	1 Lap
		6	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat diterima pertanggungjawabannya oleh KPPN	100%	100%

Saat ini bangsa Indonesia telah bergerak maju dalam hal pewujudan birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas korupsi. Bahkan, dewasa ini tuntutan reformasi birokrasi bukan lagi hal baru dan isu normatif yang selalu dapat dikesampingkan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah lembaga peradilan dan penegakan hukum memiliki tanggung jawab lebih besar untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai reformasi birokrasi dan semangat anti korupsi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wujud upaya tersebut yang pada 2009 telah dan akan terus dilaksanakan adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi MK sebagai Lembaga Negara kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, tidak terkecuali untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan. MK sebagai lembaga negara, di samping senantiasa berupaya memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat tentunya juga harus menunaikan kewajiban dalam hal mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sejak 2007 sampai dengan 2009, tercatat telah sebanyak tiga kali secara beruntun MK meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan laporan keuangan negara, yaitu masing-masing untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu, pada 2009 MK juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008

dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Departemen Keuangan RI pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan pada 11 Agustus 2009. Penghargaan ini diberikan karena didasarkan pada pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan elemen fundamental dari akuntabilitas dan transparansi dari setiap organisasi modern.

Guna menjaga MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya dan akuntabel, pada 2009 seluruh pegawai MK kembali menyatakan komitmennya dalam melawan korupsi melalui penegakan kode etik pegawai. Selain itu, seluruh pegawai MK setiap tahun menyatakan komitmennya untuk mempertahankan predikat opini WTP sebagai target yang mesti dicapai.

Beberapa catatan di atas merupakan wujud dari upaya yang terus menerus dilakukan oleh MK dalam rangka mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik. Diharapkan upaya-upaya tersebut menjadi ikhtiar guna menciptakan dan mempertahankan MK yang bebas dari korupsi.

## **B. EVALUASI ANGGARAN**

Pada Tahun Anggaran 2009 ini, MK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.193.173.425.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2009, dari alokasi anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp.162.706.637.791,- atau sebesar 84,23%. Secara umum realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan MK seperti penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres serta Pemilukada, peningkatan kesadaran berkonstitusi, serta peningkatan dan pengembangan dukungan administrasi umum dan yustisial yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan organisasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0001.0/077-01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, realisasi 7 (tujuh) program Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, secara umum juga telah memenuhi target output yang telah direncanakan sebelumnya. Tingkat pencapaian realisasi yang melebihi 80 persen menunjukkan bahwa upaya keras dan konsisten yang dilakukan MK sepanjang 2009 telah membuahkan hasil yang cukup sepadan. Hal ini juga menunjukkan target efisiensi anggaran telah dapat dilaksanakan dengan baik.

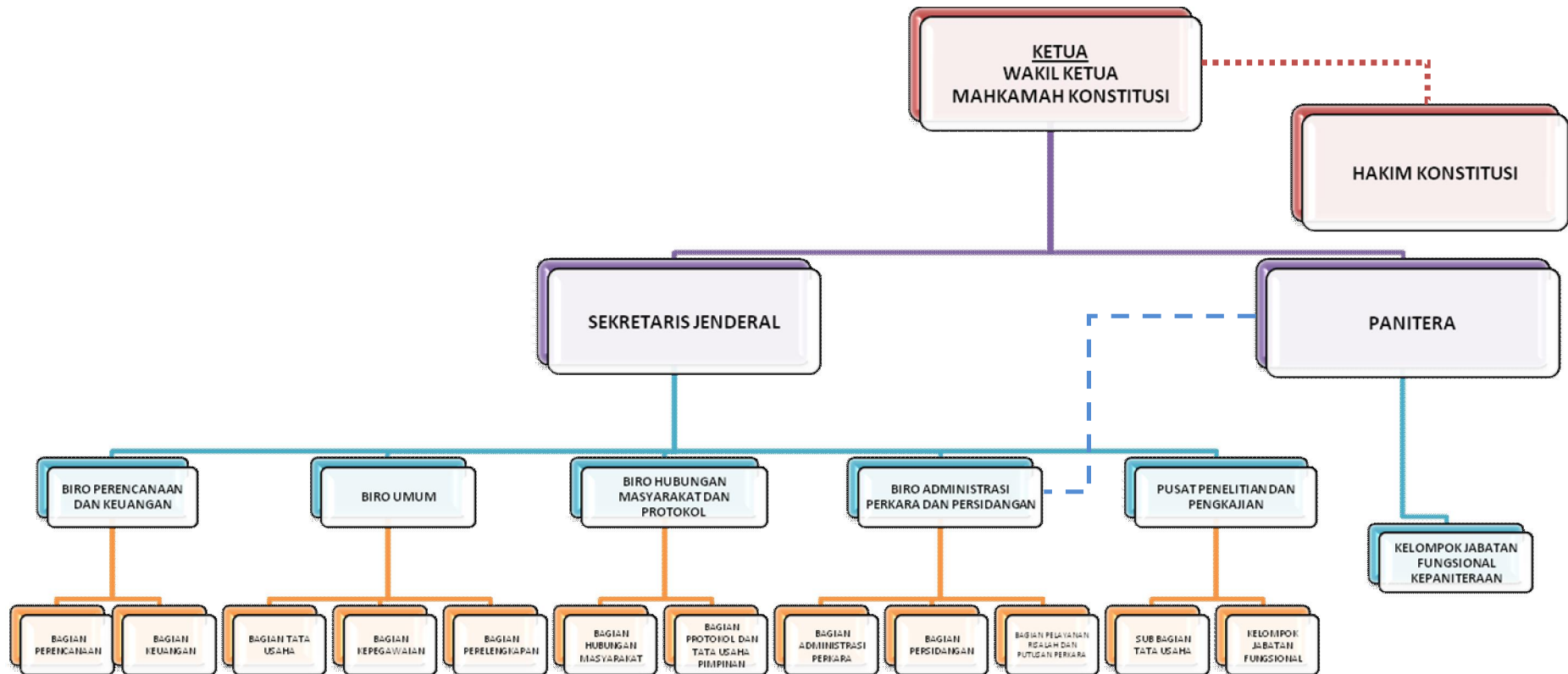
Berikut ini adalah tabel rincian realisasi anggaran MK per program kegiatan selama tahun anggaran 2009.

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	88.251.000.000	70.845.651.352	80,28%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.000.000.000	2.410.859.905	48,22%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	15.000.000.000	11.962.745.084	79,75%
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	28.900.000.000	26.235.567.895	90,78%
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA	32.854.400.000	28.782.406.382	87,61%
PROGRAM PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM	20.296.130.000	19.857.914.082	97,84%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM	2.871.895.000	2.611.493.091	90,93%
<b>TOTAL</b>	<b>193.173.425.000</b>	<b>162.706.637.791</b>	<b>84,23%</b>



Lampiran 1.

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIRO ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN</b>								
1	<b>PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	1 Penyempurnaan/revisi PMK tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	<b>Input:</b> Dana SDM Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Produk Hukum Mahkamah Konsitusi yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman yang baku bagi berbagai pihak dalam berperkara tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	rupiah orang Peraturan paket %	128.460.000 15 3 1 100	33.150.000 15 3 1 100	25,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
		2 Penyempurnaan/revisi PMK tentang SKLN	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman yang baku dalam berperkara tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	rupiah orang Peraturan paket %	28.160.000 15 3 1 100	9.150.000 15 3 1 100	32,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
		3 Penyempurnaan/revisi PMK tentang PPU Legislatif	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan	rupiah orang Peraturan	135.220.000 15 3	92.500.000 15 3	68,41% 100,00% 100,00%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman yang baku dalam berperkara tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD	<p>paket</p> <p>%</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	
		4 Penyempurnaan/revisi PMK tentang Pemberhentian hakim dan Pergantian Antar Waktu	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap untuk Pemberhentian Antar Waktu Hakim Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman yang baku bagi Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Hakim dan Pergantian Antar Waktu	<p>rupiah</p> <p>orang</p> <p>Peraturan</p> <p>Paket</p> <p>%</p>	<p>128.460.000</p> <p>15</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>100</p>	<p>38.670.000</p> <p>15</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>100</p>	<p>30,10%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	
		5 Penyempurnaan/revisi PMK tentang Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  <b>Outcome:</b>	<p>rupiah</p> <p>orang</p> <p>Peraturan</p> <p>paket</p>	<p>128.460.000</p> <p>15</p> <p>3</p> <p>1</p>	<p>35.718.000</p> <p>15</p> <p>3</p> <p>1</p>	<p>27,80%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Terciptanya pedoman yang baku bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan Pemilihan dan Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua	%	100	100	100,00%	
		6 Penyempurnaan/revisi PMK tentang Pemilukada	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman beracara dalam perkara Pemilukada	rupiah orang Peraturan paket %	128.460.000 15 3 1 100	34.434.000 15 3 1 100	26,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
		7 Penyempurnaan/revisi PMK tentang Penyusunan Penulisan Putusan PHPU	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman beracara yang lengkap dalam Penulisan Putusan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman yang baku bagi berbagai pihak dalam penyusunan penulisan	rupiah orang Peraturan paket %	97.786.000 15 3 1 100	23.587.000 15 3 1 100	24,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
		8 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Yustisial Pemilihan Umum Kepala Daerah	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya petunjuk teknis penyelenggaraan Administrasi Yustisial Pemilihan Umum Kepala Daerah	rupiah orang Peraturan paket %	146.836.000 30 3 1 100	101.288.888 30 3 1 100	68,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman dalam penyelenggaraa Administrasi Yustisial Pemilihan Umum Kepala Daerah	%	100	100	100,00%	
		9 Penyusunan BAP dan Miinutasi	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya Berita Acara persidangan penyelenggaraan pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah <b>Outcome:</b> Terciptanya Berita Acara Persidangan Pemilihan Umum Kepala Daerah	rupiah orang Peraturan paket %	146.836.000 30 3 1 100	84.018.500 30 3 1 100	57,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
		10 Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Setempat Pemilihan Umum Kepala Daerah	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Tersusunnya pedoman teknis beracara dalam penyelenggaraan Pemeriksaan Setempat Pemilihan Umum Kepala Daerah <b>Outcome:</b> Terciptanya pedoman beracara dalam penyelenggaraan pemeriksaan setempat Pemilihan Umum Kepala Daerah	rupiah orang Peraturan paket %	42.050.000 30 3 1 100	2.400.000 30 3 1 100	5,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
2	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN HAM</b>	1 Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham	<b>Input:</b> Dana <b>SDM</b> Peraturan <b>Output:</b> Terselenggaranya diklat hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah	rupiah orang peraturan paket	2.871.895.000 400 7 2	2.436.593.091 472 7 2	84,84% 118,00% 100,00% 100,00%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Outcome:</b> Terpenuhinya kebutuhan SDM yang mengetahui dan memahami hukum acara perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah	%	100	100	100,00%	
3	PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	1 Penyelenggaraan Kegiatan Umum Pendukung Pemilihan Umum	Input: Dana SDM Peraturan Output: Terselenggaranya Kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah  Outcome: Terselesaikannya pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah.	rupiah orang peraturan  bulan  %	20.296.130.000 400 7  6  100	19.863.214.082 400 7  6  100	97,87% 100,00% 100,00%  100,00%  100,00%	
4	PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	1 Penerimaan permohonan perkara	Input: a. SDM b. Peraturan c. Berkas permohonan Output: a. Tanda terima penerimaan berkas permohonan perkara b. Berkas perkara Output: Dapat diterimanya permohonan untuk diperiksa kelengkapannya	orang paket perkara  perkara Berkas perkara	4 3 170  170 170 170	7 3 177  177 177 177	175,00% 100,00% 104,12%  104,12% 104,12% 104,12%	
		2 Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Perkara	Input: a. SDM b. Dokumen c. Berkas permohonan Output: a. Checklist berkas permohonan perkara	orang UD, UU, PM Perkara perkara	4 170 170  170	7 177 177  177	175,00% 104,12% 104,12%  104,12%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Berkas perkara Outcome: a. Dapat dikembalikannya berkas tidak lengkap untuk dilengkapi pemohon  b. Dapat diregistrasinya permohonan yang telah lengkap c. Dapat diselesaikannya pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas secara tepat waktu	berkas  perkara  perkara  perkara	170  30  140  170	177  30  152  177	104,12%  100,00%  108,57%  104,12%	
		3	Memberitahukan kekurangan kelengkapan permohonan perkara  Input: a. SDM b. Dokumen/checklist c. Berkas permohonan Output: Checklist berkas permohonan perkara  Outcome: Pemohon dapat melengkapi syarat permohonan	orang bekas berkas  berkas  berkas	4 30 30  30  5	7 30 30  30  5	175,00% 100,00% 100,00%  100,00%  100,00%	
		4	Melakukan penerbitan akta tidak diregistrasi  Input: a. SDM b. Berkas permohonan c. Peraturan Output: Akta tidak diregistrasi Outcome: tidak lengkap untuk dilengkapi pemohon	orang berkas paket  Berkas  berkas	4 25 3  25  25	7 25 3  25  25	175,00% 100,00% 100,00%  100,00%  100,00%	
		5	Melakukan Registrasi Perkara  Input: a. SDM Aparatur b. Permohonan Perkara c. Peraturan Output: a. Akta Registrasi Outcome: a. Dapat ditetapkan Panel Hakim b. Dapat ditetapkan Panitera Pengganti	orang dok paket  dok  Berkas Berkas	4 140 3  140 140  140 140	7 152 3  152 152  152 152	175,00% 108,57% 100,00%  108,57% 108,57%  108,57% 108,57%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Dapat disampaikan salinan Permohonan d. Dapat disusun resume permohonan perkara e. Dapat tercatatnya dalam buku registrasi	Berkas Berkas Berkas	140 140 140	152 152 152	108,57% 108,57% 108,57%	
		6 Mengusulkan Ketetapan Panel Hakim	Input: a. SDM, Ketua/Wakil Ketua MKRI b. Berkas yang telah diregistrasi Output: Usulan Susunan Panel hakim Outcome: Terbitnya Panel Hakim Sidang	orang berkas berkas berkas	2 140 140 140	4 152 152 152	200,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
		7 Mengusulkan Ketetapan Hari Sidang	Input: a. SDM, Ketua Panel Hakim b. Berkas perkara Output: Usul penetapan hari sidang Outcome: Dapat terlaksananya pemeriksaan perkara	orang berkas berkas berkas	5 140 140 140	5 152 152 152	100,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
		8 Mengusulkan Ketetapan Panitera Pengganti	Input: a. SDM, Panitera b. Berkas perkara Output: Penetapan panitera Pengganti Outcome: Dipahaminya permohonan secara cepat	orang berkas berkas berkas	5 140 140 140	5 152 152 152	100,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
		9 Menyusun Resume Permohonan Perkara	Input: a. SDM Aparatur b. Berkas perkara Output: Resume perkara Outcome: Diketahuinya substansi permohonan secara tepat	orang berkas berkas berkas	2 140 140 140	7 152 152 152	350,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
		10 Melakukan Pencatatan Dalam	Input:					



No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Buku Registrasi Perkara	a. SDM aparatur b. berkas perkara yang telah memenuhi syarat c. BRPK Output: Perkara yang telah diregistrasi Outcome: Dapat ditindaklanjuti proses pemeriksaan perkara	orang berkas berkas berkas berkas	4 140 140 140 140	7 152 152 152 152	175,00% 108,57% 108,57% 108,57% 108,57%	
		11 Mendistribusikan berkas perkara kepada para Hakim/Panitera/Panitera Pengganti	Input: a. SDM Aparatur b. Berkas perkara yang telah diregistrasi Output: Terdistribusikannya Perkara kepada para Hakim Outcome: Tersiapkannya perkara yang akan diperiksa oleh Hakim Konsitusi	orang berkas berkas berkas	5 140 140 140	7 152 152 152	140,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
	PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN	1 Mengusulkan penjadwalan sidang	Input: a. SDM Aparatur b. Ketetapan hari sidang c. berkas perkara Output: Usul jadwal sidang Outcome: a. Ditetapkannya jadwal sidang b. diumumkannya persidangan	orang jadwal berkas jadwal jadwal jadwal	5 140 140 560 560 560	5 152 152 608 608 608	100,00% 108,57% 108,57% 108,57% 108,57% 108,57%	
		2 Penyampaian salinan permohonan	Input: a. SDM jurupanggil b. Berkas perkara Output: diterima salinan permohonan oleh para pihak terkait Outcome: Dapt diketahui substansi permohonan oleh para pihak terkait	orang berkas salinan salinan	5 140 700 700	10 152 760 760	200,00% 108,57% 108,57% 108,57%	
		3 Disampaikannya Salinan perbaikan permohonan	Input: a. SDM jurupanggil b. berkas perkara	orang berkas	5 140	10 152	200,00% 108,57%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Output: Berita acara salinan penyampaian perbaikan permohonan	berkas	700	90	12,86%		
			Outcome: Dapat disampaikannya salinan perbaikan permohonan kepada lembaga/pihak terkait	berkas	700	90	12,86%		
		4	Diterimanya keterangan tertulis dan surat-surat lain terkait	Input: a. SDM Aparatur b. Berkas perkara	orang berkas	5 140	5 152	100,00% 108,57%	
				Output: Diterimanya keterangan tertulis dari para pihak	berkas	700	760	108,57%	
				Outcome: Dapat diketahuinya pendirian DPR, Pemerintah, pihak terkait dan pemohon dan termohon terkait substansi permohonan	berkas	700	760	108,57%	
		5	Melakukan pemanggilan kepada para pihak	Input: a. SDM Aparatur b. Hasil RPH	orang berkas	10 140	10 152	100,00% 108,57%	
				Output: Surat panggilan sidang	berkas	700	304	43,43%	
				Outcome: tersampainya surat panggilan	berkas	700	304	43,43%	
		6	Menghadirkan para pihak dalam persidangan	Input: a. SDM b. Surat panggilan	orang berkas	10 700	10 304	100,00% 43,43%	
				Output: Kehadiran pemohon dalam persidangan	berkas	700	304	43,43%	
				Outcome: a. Terlaksananya Sidang pemeriksaan	berkas	700	304	43,43%	
				b. Dapat dijadwalkan untuk Rapat pemeriksaan	berkas	700	304	43,43%	
				c. Dapat tersusunnya Berita Acara Pemeriksaan	berkas	700	304	43,43%	
				d. Dapat tersusunnya Risalah Persidangan	berkas	700	304	43,43%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		7	Mendukung terlaksananya sidang pemeriksaan pendahuluan	Input: a. SDM, Hakim, Panitera Pengganti dan aparatur b. Berkas Perkara Output: Terlaksananya Persidangan Pendahuluan Outcome: a. Dapat dilakukan perbaikan permohonan b. Dapat dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim c. Dapat tersusunnya Berita Acara pemeriksaan d. Dapat tersusunnya Risalah Persidangan	orang  berkas  orang  berkas orang berkas berkas	40  140  140  140 140 140 140	40  152  152  152 152 152 152	100,00%  108,57%  108,57%  108,57% 108,57% 108,57% 108,57%	
		8	Penerimaan perbaikan permohonan pemohon	Input: a. SDM Aparatur b. Hasil persidangan pendahuluan Output: Perbaikan Permohonan Outcome: dapat disampaikan perbaikan permohonan kepada DPR, Pemerintah dan Pihak Terkait Hakim	orang berkas  berkas berkas	5 140  140 700	5 152  152 760	100,00% 108,57%  108,57% 108,57%	
		9	Mendukung Pelaksanaan RPH untuk Laporan Panel	Input: a. SDM, Hakim, panitera, Panitera Pengganti, aparatur b. Berkas perkara Output: a. Dapat ditetapkan Sidang Panel untuk perbaikan permohonan b. Dapat dipanggilnya pemohon dan termohon untuk Panel hakim Outcome: Dapat diperoleh kejelasan substansi pokok perkara	orang  kali  berkas berkas berkas	18  140  140 140 140	20  152  304 304 304	111,11%  108,57%  217,14% 217,14% 217,14%	
		10	Melakukan pemanggilan kepada pemohon	Input: a. SDM, aparatur b. Hasil RPH Output:	orang berkas	8 140	10 152	125,00% 108,57%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Surat panggilan sidang untuk perbaikan pemohon untuk hadir di persidangan	surat	280	304	108,57%		
			Outcome: Tersampainya surat panggilan kepada pemohon untuk hadir di persidangan perbaikan permohonan	surat	280	304	108,57%		
		11	Melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan (perbaikan permohonan)	Input: a. SDM (Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera pengganti) b. Berkas perkara Output: Pemeriksaan berkas perbaikan permohonan Outcome: Dapat dijadwalkan RPH	orang berkas berkas berkas	38 140 140 140	40 152 304 304	105,26% 108,57% 217,14% 217,14%	
		12	Mendukung Pelaksanaan RPH untuk laporan Panel (Sidang Lanjutan)	Input: a. SDM, Hakim, panitera, Panitera Pengganti, aparatur b. Berkas perkara sidang pemeriksaan Output: a. Dapat terjadwalkan sidang pleno b. dapat dipanggilnya para pihak untuk hadir di persidangan. c. dapat didengarnya keterangan dari pemohon saksi, dan pihak terkait dalam persidangan Outcome: Dapat dilanjutkan Pemeriksaan Persidangan	orang berkas berkas berkas berkas	18 140 140 140 140	20 152 152 152 152	111,11% 108,57% 108,57% 108,57% 108,57%	
		13	Melakukan dukungan dalam pemeriksaan persidangan	Input: a. SDM, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, aparatur b. Berkas perkara Output: a. Diketuinya kejelasan pokok permohonan b. Diperolehnya pendirian para pihak terkait dan pemohon dan termohon Outcome:	orang berkas berkas berkas	38 140 140 140	40 152 456 456	105,26% 108,57% 325,71% 325,71%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			a. Dapat dijadwalkan RPH dalam pengambilan keputusan b. dapat diperolehnya dasar-dasar untuk keputusan oleh Majelis Hakim	berkas berkas	140 140	456 456	325,71% 325,71%	
		14 Melaksanakan RPH untuk pengambilan keputusan	Input: a. SDM, (Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti) b. Berkas Perkara Output: a. Pendapat hakim terhadap substansi b. putusan yang diambil Outcome: a. Dapat dibacakan putusan dalam sidang pembacaan putusan b. dapat disampaikan panggilan kepada pemohon dan para pihak untuk sidang pembacaan putusan	orang berkas berkas berkas berkas berkas	15 140 140 140 140 140	20 135 135 135 135 134	133,33% 96,43% 96,43% 96,43% 96,43% 95,71%	
		15 Melaksanakan penyusunan Berita Acara Persidangan	Inputs: a. SDM Aparatur b. Catatan Persidangan/Risalah Outputs: Berita Acara Persidangan Outcomes: Tercatatnya proses pemeriksaan persidangan	orang sidang berkas berkas	8 700 700 700	10 670 760 760	125,00% 95,71% 108,57% 108,57%	
3	PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	1 Melaksanakan sidang Pembacaan Putusan	Inputs: a. SDM (Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, aparatur) b. Berkas Perkara Outputs: Putusan Mahkamah Konstitusi Outcomes: a. Dapat disampaikan salinan putusan b. Dapat disampaikan salinan putusan kepada publik c. Dapat disusun kaidah hukum putusan d. Dapat dimuatnya putusan dalam dalam berita negara e. Dapat diminasinya berkas perkara	orang berkas berkas berkas berkas berkas berkas	35 140 140 140 140 140 140	40 135 135 135 135 135 135	114,29% 96,43% 96,43% 96,43% 96,43% 96,43% 96,43%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			f. Dapat dimuatnya dalam website g. Direkamnya proese persidangan pembacaan putusan	berkas berkas	140 140	135 135	96,43% 96,43%	
	<b>PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN</b>	<b>1 Melaksanakan Pembuatan Laporan Perkara</b>	<b>Inputs:</b>  a. SDM, aparatur b. Berkas Perkara <b>Outputs:</b> Laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan <b>Outcomes:</b> a. Dapat diterimanya informasi penanganan Penyelesaian perkara b. Dapat dimuatnya dalam Berita berkala MKRI	orang berkas  berkas  berkas berkas	6 140  140  140 140	10 135  135  135 135	166,67% 96,43%  96,43%  96,43% 96,43%	
	<b>PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN</b>	<b>1 Melaksanakan minutasia perkara</b>	<b>Inputs:</b>  a. SDM, aparatur b. Berkas Perkara <b>Outputs:</b> Inventarisasi dan pengarsipan perkara <b>Outcomes:</b> a. Tersusunnya berkas perkara dalam satu bundel	orang berkas  berkas  berkas	6 140  140  140	10 135  135  135	166,67% 96,43%  96,43%  96,43%	
		<b>2 Melaksanakan Pembundelan Perkara</b>	<b>Inputs:</b> a. SDM, aparatur b. Berkas Perkara <b>Outputs:</b> Arsip berkas perkara <b>Outcomes:</b> Dapat disajikan referensi di perpustakaan	orang berkas  berkas  berkas	6 140  140  140	10 135  135  135	166,67% 96,43%  96,43%  96,43%	
		<b>3 Melaksanakan Pembundelan Putusan Mahkamah</b>	<b>Inputs:</b> a. SDM, aparatur b. Berkas Perkara <b>Outputs:</b> Kumpulan Putusan <b>Outcomes:</b> Dapat disajikan yurisprudensi	orang berkas  berkas  berkas	6 140  140  140	10 135  135  152	166,67% 96,43%  96,43%  108,57%	
	<b>PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN</b>	<b>1 Melaksanakan digitalisasi berkas perkara</b>	<b>Inputs:</b>  a. SDM, aparatur	orang	6	10	166,67%	

No.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Berkas Perkara <b>Outputs:</b> Digitalisasi berkas perkara <b>Outcomes:</b> Terlaksananya digitalisasi berkas perkara	berkas berkas berkas	140 140 140	135 135 135	96,43% 96,43% 96,43%	
	PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	1 Dilakukannya perekaman persidangan	<b>Inputs:</b> a. SDM, aparatur	orang	6	10	166,67%	
b. Berkas Perkara			sidang	700	760	108,57%		
<b>Outputs:</b> Hasil Rekam		berkas	700	760	108,57%			
<b>Outcomes:</b> Dapat dijadikan dasar penyusunan Risalah		berkas	700	760	108,57%			
	2 Melaksanakan Penyusunan Risalah Persidangan		<b>Inputs:</b> a. SDM, aparatur	orang	35	40	114,29%	
b. Hasil Rekam Persidangan			sidang	700	760	108,57%		
<b>Outputs:</b> Risalah Persidangan			berkas	700	760	108,57%		
<b>Outcomes:</b> a. Dapat dijadikan dasar penyusunan berita acara			berkas	700	760	108,57%		
b. Dapat dijadikan dasar pembuatan putusan			berkas	700	760	108,57%		
c. Dapat disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan			berkas	700	760	108,57%		
d. Dapat dimuatnya dalam website	berkas	700	760	108,57%				

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIRO UMUM</b>								
<b>BAGIAN KEPEGAWAIAN</b>								
1	PENGELOLAAN SDM APARATUR	1.01. Diklat Pim TK II	<u>Inputs:</u> a. SDM b. Dana  <u>Outputs :</u> Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM  <u>Outcomes :</u> Peningkatan wawasan dan kompetensi pejabat struktural , kinerja organisasi akan meningkat	orang Rupiah	4 238.630.000	4 90.164.825	100% 38%	
		1.04. Diklat Penyertaan	<u>Inputs:</u> a. SDM b. Dana  <u>Outputs :</u> Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis penyertaan (Perbendaharaan, Kepegawaian, Pengawasan Intern, Pengelolaan BMN, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan, Kearsipan, Penelitian, Perpustakaan dan Kesehatan)  <u>Outcomes :</u> Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai, kinerja organisasi akan meningkat	orang Rupiah	4 196.852.000	4 100.229.000	100% 51%	
		1.05. Kursus Bahasa Inggris	<u>Inputs:</u> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	7 526.560.000	7 266.054.545	100% 51%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MKRI yang mengikuti kursus Bahasa Inggris	Kelas	6	11	183%	
				Term	2	1	50%	
				Orang	67	105	157%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan skill berbahasa inggris dengan lancar, baik dan benar	%	80	80	100%	
		1.06. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang	15	15	100%	
				Rupiah	115.998.000	68.439.500	59%	
			<b>Outputs :</b> Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	orang	60	65	108%	
				Sertifikasi Ahli Pengadaan	15	17	113%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan pemahaman pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003	%	100	100	100%	
		1.07. Diklat Motivasi dan Budaya Kerja	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang	20	20	100%	
				Rupiah	990.310.000	477.989.000	48%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti diklat motivasi dan budaya kerja	orang	265	175	66%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan kinerja seiring dengan tertanamnya budaya kerja unggul dari pegawai MKRI	%	80	80	100%	
		1.08. Diklat Penyusunan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	<b>Inputs:</b> a. SDM	orang	20	20	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Dana	Rupiah	113.470.000	72.300.000	64%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penyusunan anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	orang	70	52	74%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam fungsi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran	%	80	80	100%	
		1.09. In-House Training SAI	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	20 80.160.000	20 40.439.260	100% 50%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti in-house training SAI	orang	70	40	57%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan keterampilan pegawai dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi simak-bmn dan sak	%	80	80	100%	
		1.10. Diklat Penanganan Bencana Alam	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	15 107.480.000	15 47.204.500	100% 44%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penanganan bencana	orang	25	70	280%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam penanganan pertama bahaya kebakaran	%	80	80	100%	
		1.11. Diklat Public Service Excellence	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	15 161.905.000	15 85.470.000	100% 53%	
			<b>Outputs :</b>					

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat public service excellence	orang	45	200	444%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan keterampilan dan attitude pegawai dalam pelayanan prima	%	80	90	113%	
		1.12. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	7 107.465.000	7 99.324.000	100% 92%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	orang	20	20	100%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan pengetahuan CPNS dalam hal mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban sebagai PNS.	%	80	80	100%	
		1.13. Rintisan Gelar	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana	orang Rupiah	3 753.195.000	3 200.500.000	100% 27%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan pendidikan gelar gelar	orang	25	5	20%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan kinerja dan kecakapan konseptual dalam hal kelembagaan publik, untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi Setjen dan Kepaniteraan MKRI	%	80	80	100%	
		1.14. Tim Reformasi Birokrasi	<b>Inputs:</b> a. Waktu b. Dana c. SDM	Bulan Rupiah orang	2 80.265.000 17	2 21.524.800 15	100% 27% 88%	
			<b>Outputs :</b> Jumlah dokumen tahapan reformasi birokrasi yang telah disusun	dokumen	1	1	100%	
			<b>Outcomes :</b> Peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan publik	%	80	80	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		1.15. Penyusunan Analisa Jabatan	<b>Inputs:</b> a. Kegiatan b. Dana  <b>Outputs :</b> Jumlah dokumen reformasi birokrasi yang dapat disusun : 1. Peta Jabatan 2. Informasi Jabatan 3. Spesifikasi Jabatan Indikator Kinerja 4.  <b>Outcomes :</b> Peningkatan kinerja pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi umum	Kegiatan Rupiah  dokumen  %	1 93.400.000  1 80	1 25.650.000  1 80	100% 27%  100% 100%	
		1.16. Pengujian Kesehatan Pengangkatan PNS	<b>Inputs:</b> a. Kegiatan b. Dana  <b>Outputs :</b> Jumlah calon CPNS yang mengikuti kegiatan pengujian kesehatan CPNS  <b>Outcomes :</b> Jumlah CPNS yang mengerti akan wawasan kerja dan adaptasi terhadap lingkungannya	Orang Rupiah  Orang  %	4 12.824.000  20 100	4 9.845.000  20 100	100% 77%  100% 100%	
		1.17. Penyelenggaraan Orientasi CPNS	<b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana c. Kegiatan  <b>Outputs :</b> Jumlah CPNS mengikuti kegiatan orientasi CPNS  <b>Outcomes :</b> Jumlah CPNS yang mengerti akan wawasan kerja dan adaptasi terhadap lingkungannya	orang Rupiah Kegiatan	10 44.500.000 2	10 8.613.000 1	100% 19% 50%	
		1.18. Placement Test dan Assessment Test	<b>Inputs:</b>					

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			a. SDM	orang	7	7	100%	
			b. Dana	Rupiah	5.480.000	-	0%	
			<b>Outputs :</b>					
			Sejumlah test terhadap kebutuhan SDM organisasi Setjen dan Kepaniteraan MKRI	orang	15	4	27%	
			<b>Outcomes :</b>					
			Peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dan kapabilitas pegawai	%	80	80	100%	
		1.19. Tim Baperjakat						
			<b>Inputs:</b>					
			a. Waktu	Bulan	12	12	100%	
			b. Dana	Rupiah	54.611.000	51.000.000	93%	
			c. Sdm	Orang	8	8	100%	
			<b>Outputs :</b>					
			Sejumlah pertimbangan atas pembinaan karir pegawai	Dokumen	1	1	100%	
			<b>Outcomes :</b>					
			Meningkatkan obyektifitas terhadap kebijakan pembinaan karir pegawai	%	80	80	100%	
		1.20. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja						
			<b>Inputs:</b>					
			a. Waktu	Bulan	12	12	100%	
			b. Dana	Rupiah	102.470.000	58.797.500	57%	
			<b>Outputs :</b>					
			Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan	Dokumen	1	1	100%	
			<b>Outcomes :</b>					
			Terwujudnya pelayanan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kewenangan MKRI yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan	%	100	80	80%	
		1.21. Pembinaan Kepegawaian						
			<b>Inputs:</b>					
			a. Kegiatan	Kegiatan	5	5	100%	
			b. Dana	Rupiah	785.100.000	462.991.875	59%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<p><b>Outputs :</b> Kegiatan pembinaan pegawai yang mengarah pada peningkatan motivasi dan kajian kekuatan spiritual</p> <p><b>Outcomes :</b> Terwujudnya kinerja pegawai yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kewenangan MKRI</p> <p><b>Inputs:</b> a. Kegiatan b. Dana</p> <p><b>Outputs :</b> Sejumlah CPNS hasil perekrutan</p> <p><b>Outcomes :</b> Peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI</p> <p><b>Inputs:</b> a. SDM b. Dana</p> <p><b>Outputs :</b> Uji Kesehatan bagi CPNS yang memenuhi syarat kesehatan yang diinginkan untuk dapat diangkat menjadi PNS</p> <p><b>Outcomes :</b> Ditetapkan beberapa CPNS hasil pengujian kesehatan untuk dipertimbangkan menjadi PNS MKRI</p> <p><b>Inputs:</b> a. Dana b. SDM</p> <p><b>Outputs :</b> Terselenggaranya premi asuransi Hakim dan Keluarga selama 1 tahun</p>	<p>Kegiatan</p> <p>%</p> <p>Kegiatan Rupiah</p> <p>CPNS</p> <p>%</p> <p>orang Rupiah</p> <p>CPNS</p> <p>%</p> <p>Rupiah orang</p> <p>orang</p>	<p>5</p> <p>100</p> <p>1 397.875.000</p> <p>15</p> <p>100</p> <p>4 31.450.000</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>475.000.000 7</p> <p>35</p>	<p>5</p> <p>80</p> <p>1 137.000.000</p> <p>12</p> <p>80</p> <p>4 1.200.000</p> <p>30</p> <p>100</p> <p>375.000.000 7</p> <p>26</p>	<p>100%</p> <p>80%</p> <p>100% 34%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100% 4%</p> <p>60%</p> <p>100%</p> <p>79% 100%</p> <p>74%</p>	
2.	PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	2.01. Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)						

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Outcomes :</u> Peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi	%	100	100	100%	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2009**

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
Penerapan Kepemerintahan yang Baik	1,1 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS	<b>Input:</b> Dana	Rupiah	214.560.000	119.809.600	55,84%	
		SDM	Orang	5	5	100,00%	
		<b>Output:</b> Jumlah pegawai yang diberikan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang	149	149	100,00%	
		<b>Outcome:</b> Peningkatan pelaksanaan tugas pegawai MK	%	100	90	90,00%	
	1,2 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	<b>Input:</b> Dana	Rupiah	1.843.650.000	1.122.353.737	60,88%	
		SDM	Orang	5	5	100,00%	
		<b>Output:</b> Jumlah jamuan yang tersaji	OH	39.060	39.060	100,00%	
		<b>Outcome:</b> Tersajinya jamuan untuk pertemuan/delegasi/ tamu	%	100	100	100,00%	



PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
	1,3 Perawatan Gedung Kantor	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terpeliharanya gedung kantor dan rumah negara <b>Outcome:</b> Terawatnya gedung kantor selama 12 bulan	Rupiah Orang M2 %	13.468.948.000 7 35.530 100	12.895.618.248 7 35.530 100	95,74% 100,00% 100,00% 100,00%	
	1,4 Perawatan Rumah Negara	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terpeliharanya gedung kantor dan rumah negara <b>Outcome:</b> Terawatnya rumah negara selama 12 bulan	Rupiah Orang paket %	1.712.580.000 7 2 100	1.565.694.176 7 2 100	91,42% 100,00% 100,00% 100,00%	
	1,5 Perbaikan Peralatan Kantor	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Peralatan kantor siap pakai	Rupiah Orang paket	4.978.024.000 6 21	2.724.301.146 6 21	54,73% 100,00% 100,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
		<b>Outcome:</b> Terawatnya peralatan kantor selama 1 tahun	%	100	90	90,00%	
	1,6 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Peralatan/perlengkapan kantor <b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor dalam 12 bulan	Rupiah Orang paket %	350.100.000 6 2 100	304.509.705 6 2 100	86,98% 100,00% 100,00% 100,00%	
	1,7 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terawatnya kendaraan bermotor roda 4 secara berkala <b>Outcome:</b> Kendaraan bermotor roda 4 agar siap digunakan	Rupiah Orang Unit %	839.650.000 6 41 100	594.517.978 6 41 100	70,81% 100,00% 100,00% 100,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
	1,8 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terawatnya kendaraan bermotor roda 2 secara berkala <b>Outcome:</b> Kendaraan bermotor roda 2 agar siap digunakan	Rupiah Orang  Unit  %	53.200.000 6  19  100	34.341.500 6  19  100	64,55% 100,00%  100,00%  100,00%	
	1,9 Langganan Daya dan Jasa	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Tersedianya pasokan listrik, air dan jasa telepon <b>Outcome:</b> Terselenggaranya kegiatan operasional kantor	Rupiah Orang  paket  %	6.591.792.000 6  3  100	4.213.174.408 6  3  100	63,92% 100,00%  100,00%  100,00%	
	1.10 Iklan/Pengumuman/ Pemberitahuan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b>	Rupiah Orang	95.250.000 6	71.856.378 6	75,44% 100,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
		jumlah pemuatan lelang MK di media masa <b>Outcome:</b> Termuatnya pengumuman lelang MK	kali  %	15  100	15  100	100,00%  100,00%	
	1.11 Sewa Jaringan Telekomunikasi (leased channel) Satelit	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Tersedianya jaringan internet, TV dan frekuensi <b>Outcome:</b> Terselenggaranya kegiatan operasional kantor	Rupiah Orang  bulan  %	2.020.000.000 6  12  100	705.300.389 6  12  90	34,92% 100,00%  100,00%  90,00%	
	1.12 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terselenggaranya pemeliharaan ICT (server, IP telepon, sistem koneksi) <b>Outcome:</b> Terselenggaranya kegiatan operasional kantor	Rupiah Orang  bulan  %	279.543.000 6  12  100	275.339.690 6  12  100	98,50% 100,00%  100,00%  100,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
	2,1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Tertib administrasi pengelolaan perlengkapan <b>Outcome:</b> Terpenuhinya kegiatan pengadministrasian perlengkapan	Rupiah Orang Keg %	243.690.000 9 4 100	239.411.000 9 4 90	98,24% 100,00% 100,00% 90,00%	
	3,1 Poliklinik/Obat-obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah Kebutuhan Obat-obatan dan perlengkapan habis pakai poliklinik <b>Outcome:</b> Terpenuhinya kesehatan pegawai	Rupiah Orang Bulan %	880.000.000 7 12 100	803.039.611 7 12 100	91,25% 100,00% 100,00% 100,00%	
	3,2 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	<b>Input:</b> Dana	Rupiah	293.100.000	239.825.000	81,82%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
		SDM <b>Output:</b> Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas pegawai dan jas untuk petugas sidang, PP <b>Outcome:</b> Terpenuhinya keseragaman dan kewibawaan pegawai	Orang  Stel  %	6  596  100	6  808  100	100,00%  135,57%  100,00%	
	3,3 Pengadaan Pakaian Dinas Presiden, Wapres, Menteri, Ketua Lembaga, Pejabat Negara	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> jumlah Pakaian harian Hakim dan lencana pejabat negara <b>Outcome:</b> Terpenuhinya keseragaman dan kewibawaan pejabat negara	Rupiah Orang  Stel  %	83.700.000 6  18  100	81.650.000 6  18  100	97,55% 100,00%  100,00%  100,00%	
	3,4 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/perawat/Dokter /Satpam/Tenaga Teknis Lainnya	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b>	Rupiah Orang	71.000.000 6	44.000.000 6	61,97% 100,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN PERLENGKAPAN, BIRO UMUM</b>							
		Jumlah Pakaian kerja dan toga	Stel	56	56	100,00%	
		<b>Outcome:</b> Terpenuhinya keseragaman dan kewibawaan hakim	%	100	100	100,00%	
Peningkatan Sarana dan	3,5 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung	<b>Input:</b> Dana SDM	Rupiah Orang	8.467.000.000 9	6.821.998 9	0,08% 100,00%	
		<b>Output:</b> Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung	Paket	25	25	100,00%	
		<b>Outcome:</b> Tersedianya Perlengkapan Sarana Gedung	%	100	90	90,00%	
	3,6 Pengadaan Perelatan Kantor (Inventaris Kantor)	<b>Input:</b> Dana SDM	Rupiah Orang	6.533.000.000 9	5.127.101.121 9	78,48% 100,00%	
		<b>Output:</b> Pengadaan inventaris kantor	unit	396	396	100,00%	
		<b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan kantor	%	100	90	90,00%	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2009**

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BAGIAN TATA USAHA, BIRO UMUM</b>							
Penerapan Pemerintahan yang Baik	1.1. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terkirimnya surat/Barang melalui Pos/Kurir <b>Outcome:</b> Diterimanya Surat/dokumen sesuai tujuan alamat	rupiah Orang dokumen %	775.810.000 10 34.000 100	705.799.494 10 31.000 100	90,98% 100,00% 91,18% 100,00%	
	2.1. Penanganan Arsip PHPU	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> arsip perkara PHPU legislatif dan Pilpres 2009 tertata dan terdigitalisasi; <b>Outcome:</b> Terselamatkannya arsip perkara PHPU legislatif dan Pilpres 2009 sebagai bahan pertanggungjawaban nasional	rupiah Orang Perkara %	80.340.000 70 72 100	45.539.600 30 50 50	56,68% 42,86% 69,44% 50,00%	
	2.2. Penyusutan Arsip	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b>	rupiah orang	51.750.000 55	15.479.000 30	29,91% 54,55%	



PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Termusnahkannya arsip inaktif yang tidak bernilai guna <b>Outcome:</b> berkurangnya arsip inaktif di Unit Kerja	kali  %	2  50	2  50	100,00%  100,00%	
	2.3. Pembinaan Pengelolaan Arsip	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Terpeliharanya gedung kantor dan rumah negara <b>Outcome:</b> Terawatnya rumah negara selama 12 bulan	rupiah orang Orang %	71.810.000 15 60 50	37.610.100 15 50 60	52,37% 100,00% 83,33% 120,00%	
	2.4. Penyusunan Dokumentasi Berkas Perkara	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Tersusunnya buku dokumentasi berkas perkara <b>Outcome:</b> Buku dokumentasi berkas perkara siap dimanfaatkan oleh pengguna	rupiah orang draft %	51.020.000 10 2 50	0 10 1 30	0,00% 100,00% 50,00% 60,00%	
	2.5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Arsip Audio Visual	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Peralatan/perlengkapan kantor <b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor dalam 12 bulan	rupiah orang Dokumen %	53.336.000 7 2 50	0 5 1 40	0,00% 71,43% 50,00% 80,00%	

PROGRAM	KEGIATAN					Persentase Pencapaian Target	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.6. Penyusunan Pedoman Penanganan Arsip PHPU	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Tersusunnya Pedoman Penanganan Arsip PHPU <b>Outcome:</b> Pedoman digunakan sebagai acuan bagi pegawai dalam penanganan arsip PHPU	rupiah orang pedoman %	26.898.000 6 1 100	2.075.000 6 1 80	7,71% 100,00% 100,00% 80,00%	
	2.7. Digitalisasi Berkas Pegawai	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> terdigitalisasinya berkas pejabat negara dan pegawai MK <b>Outcome:</b> Termanfaatkannya berkas digital berkas pejabat negara dan pegawai MK	rupiah orang berkas %	40.080.000 8 50 20	0 6 20 20	0,00% 75,00% 40,00% 100,00%	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009

No	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>								
1	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	1 Pemanfaatan persidangan modern berbasis teknologi	<b>Input:</b> - SDM - Dana - Sarana/peringkat sistem IT <b>Output:</b> - Sistem Informasi MK - Permohonan Perkara Online - Konsultasi Perkara Jarak Jauh - Monitoring Perkara Persidangan MK - Persidangan MK Jarak Jauh MK - Court Recording System Website dan CMS <b>Outcome:</b> Terselenggaranya peradilan yang modern, cepat dan tepat Kemudahan masyarakat dalam mengakses peradilan MK	orang Rupiah sistem sistem % %	114 21.920.000.000 1 8 100 100	114 19.752.240.708 1 8 100 100	100% 90% 100% 100% 100% 100%	Dana dari Pengembangan Sist Informasi & Sewa jaringan Telekomunikasi
2	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	1 Melakukan kerjasama Publik	<b>Input:</b> - SDM - Dana <b>Output:</b> Perjanjian Kerjasama/MOU <b>Outcome:</b> Terjalinnnya hubungan dan kerjasama MK dengan mitra kerja	orang Rupiah MOU %	15 0 90 100	15 0 105 100	100% 117% 100%	
		2 Melaksanakan talkshow/temu wicara/Pameran/Lomba di pusat dan daerah dengan lembaga/parpol/ormas	<b>Input:</b> - SDM: Panitia, narasumber, peserta - Dana <b>Output:</b>	orang Rupiah	18 11.402.462.000	18 11.237.828.452	100% 99%	Dana dari Pembu dayaan & Pemas

No	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			forum tatap muka <b>Outcome:</b> Terbangunnya komunikasi publik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang MKRI	forum  %	59  100	142  100	241%  100%	Pameran, Dialog/ Kunjungan, Lomba
		3 Melakukan talkshow/iklan layanan masyarakat di TV dan Radio	<b>Input:</b> - SDM: Panitia, narasumber, peserta - Dana <b>Output:</b> Talkshow di tv dan radio <b>Outcome:</b> Tersosialisasinya kewenangan MK dan isu-isu ketatanegaraan kepada masyarakat	orang Rupiah  media  %	20 8.682.333.000  2  90	20 7.507.933.926  2  100	100% 86%  100%  111%	Dana dari Obrolan ILM, MKTV, FTV
		4 Memuat putusan MK di media cetak dan website	<b>Input:</b> - SDM: Panitia, narasumber, peserta - Dana <b>Output:</b> pemuatan putusan di media cetak dan website MK <b>Outcome:</b> Tersosialisasinya putusan MK kepada masyarakat luas Masyarakat dengan mudah memahami putusan MK	orang Rupiah  Putusan  %	10 7.745.000.000  100  100	10 6.839.301.577  40  40	100% 88%  40%  40%	Dana dari Pemuatan, & terjemh putusan
3	Penerapan Ke Pemerintahan yang baik	1 Melaksanakan penerbitan dan distribusi bahan publikasi	<b>Input:</b> SDM Dana <b>Output:</b> Jurnal MK Majalah Konstitusi Booklet MK Leaflet/poster MK UUD 1945/UU 24 thn 2003 (ind) UUD 1945/UU 24 thn 2003 (eng) Profil Hakim Buku Karya Hakim Buku Prosiding/seminar Buku putusan MK Buku 6 Tahun MK Buku Kumpulan Putusan Buku Kompilasi Konstitusi	orang Rupiah  Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar	10 7.438.289.000  9.000 24.000 1.450 35.000 36.250 10.000 15.000 7.150 1.500 5.000 2.600 1.000 100	10 3.537.900.759  8.000 21.000 0 30.000 35.000 1.000 6.000 2.000 1.000 0 900 0 0	100% 48%  89% 88% 0% 86% 97% 10% 40% 28% 67% 0% 35% 0% 0%	Dana dari Majalh Jurnal, Buku, belanja bahan publikasi

No	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Buku PKB	Eksemplar	18.500	4.000	22%	
			Buku naskah komprehensif UUD	Eksemplar	677	0	0%	
			Buku Risalah sidang	Eksemplar	615	0	0%	
			Buku Hukum dan konstitusi	Eksemplar	1.000	1.000	100%	
			Buku Sinopsis Putusan	Eksemplar	2.000	0	0%	
			Buku Himpunan PMK	Eksemplar	2.500	0	0%	
			Buku informasi gedung MK	Eksemplar	1.000	0	0%	
			Laporan Tahunan (ind)	Eksemplar	1.600	1.000	63%	
			Buku Lima Tahun MK	Eksemplar	1.100	500	45%	
			Buku Hukum Acara MK	Eksemplar	10.240	0	0%	
			Kalender dinding	Eksemplar	5.600	1.250	22%	
			Kalender Meja	Eksemplar	4.000	2.000	50%	
			Buku Kerja	Eksemplar	4.920	1.250	25%	
			Buku Profil MK	Eksemplar	14.000	17.000	121%	
			PMK PHPU	Eksemplar	3.800	7.000	184%	
			Pedoman Beracara PHPU	Eksemplar	3.000	7.000	233%	
			Buku Pintar PHPU	Eksemplar	7.500	1.500	20%	
			Syarah UUD 1945	Eksemplar	2.000	3.000	150%	
			<b>Outcome:</b> Tersampainya Informasi tentang MK, Konstitusi, Ketatanegaraan kepada Masyarakat	%	95	40	42%	
4	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	Menyelenggarakan pelayanan protokoler dan ketatausahaan bagi pimpinan MK	<b>Input:</b> SDM Dana Sarana/Komputer	orang Rupiah unit	24 669.837.000 24	24 639.492.053 24	100% 95% 100%	
			<b>Output:</b> Jumlah staf pendamping pimpinan	orang	24	24	100%	
			<b>Outcome:</b> Terpenuhinya kebutuhan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	%	100	100	100%	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>PUSAT PENELITIAN DAN KAJIAN</b>									
1	Penerapan Pemerintahan yang Baik	1	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi						
			Input	Dana	Rupiah	317.500.000	188.518.060	59.38%	
				SDM	orang	5	5	100%	
				Peraturan					
			Output	Penyampulan Buku	Jumlah buku yang disampul	Buah	9.000	7.775	86%
				Penggandaan Buku	Jumlah Penggandaan Buku	Buah	2.000	240	12%
				Penyampulan Buku	Jumlah Kegiatan Pengawetan Buku	Kali	2	2	100%
			Outcome	Terselenggaranya kegiatan penyampulan, pengawetan dan bedah buku	%	50	50	100%	
2	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	1	Penelitian dan Pengembangan Hukum						
			Input	Dana	rupiah	4.840.040.000	3.144.000.122	64.96%	
				SDM	Orang	6	6	100%	
				Peraturan					
			Output	Penyusunan Renstra 2010-2014	Jumlah Penyusunan Renstra 2010-2014	Kegiatan	2	2	100%
				Pertemuan Koordinasi dengan Fakultas Hukum dan PKK se-Indonesia	Jumlah Pertemuan Koordinasi Dekan dengan Fakultas Hukum dan PKK se-Indonesia	Kegiatan	2	2	100%
				Penelitian tentang Hukum dan Konstitusi	Jumlah Penelitian tentang Hukum dan Konstitusi	Kegiatan	2	1	50%
				Jurnal Konstitusi PKK	Jumlah Edisi Jurnal Konstitusi PKK	Edisi	2	2	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Outcome	Terselenggaranya penyusunan renstra, pertemuan koordinasi dan penelitian tentang hukum konstitusi	%	80	80	100%	
		2	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/ Saresehan						
			Input	Dana	rupiah	2.555.430.000	1.953.954.441	76.46%	
				SDM	orang	8	8	100%	
				Peraturan					
			Jumlah Seminar tentang Konstitusi	Jumlah Seminar tentang Konstitusi	Kegiatan	9	9	100%	
			Jumlah Bedah Buku /Peluncuran Buku tentang Konstitusi	Jumlah Bedah Buku/Peluncuran Buku tentang Konstitusi	Kegiatan	2	-	0%	
			Jumlah Diskusi Roundtable tentang Konstitusi	Jumlah Diskusi Roundtable tentang Konstitusi	Kegiatan	2	2	100%	
			Jumlah Kongres Pancasila	Jumlah Kongres Pancasila	Kegiatan	1	1	100%	
			Jumlah Debat Konstitusi	Jumlah Debat Konstitusi	Kegiatan	1	1	100%	
			Outcome	Terselenggaranya kegiatan Seminar tentang Konstitusi, Bedah Buku/Peluncuran Buku tentang Konstitusi, Diskusi Roundtable, Kongres Pancasila dan Debat Konstitusi	%	100	100	100%	
		3	Kesekretariatan dan Kerja sama Luar Negeri						
			Input	Dana	rupiah	558.930.000	-	0%	
				SDM	orang	8	-	0%	
				Peraturan					

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
			Output	Adanya kesepakatan yang dituangkan dalam meningkatkan kerja sama antara MK Indonesia dengan MK negara lain.	Kegiatan	2	-	0%	
			Outcome	Terjalannya kerja sama antara MK Indonesia dengan MK Negara Lain	%	50	-	0%	
		4	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan						
			Input	Dana	rupiah	3.300.000.000	3.041.301.500	92.16%	
				SDM	orang	5	5	100%	
				Peraturan					
			Output	Jumlah Paket Pengadaan Buku	Paket	1	1	100%	
			Outcome	Tersedianya buku-buku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Hakim Konstitusi	%	80	80	100%	
		5	Pengembangan Sistem Pengaman						
			Input	Dana	rupiah	1.700.000.000	1.596.210.000	93.89%	
				SDM	orang	6	6	100%	
				Peraturan					
			Output	Terwujudnya penyediaan alat pengaman perpustakaan	Kegiatan	1	1	100%	
			Outcome	Terjaganya koleksi buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan MKRI	%	80	80	100%	



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>									
1	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK	1	Penyusunan Program dan Rencan Kerja Teknis/Program	<b>Input:</b> SDM Dana <b>Output:</b> Tersusunnya RENSTRA 2010-2014, RKA-KL 2010, DIPA 2010 dan Revisi DIPA 2009 <b>Outcome:</b> Tersedianya RENSTRA 2010-2014 dan Anggaran Tahun 2010	orang rupiah  Keg	30 643.071.000  8	30 519.689.150  8	100% 80,81%  100%	
		2	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	<b>Input:</b> SDM Dana <b>Output:</b> Tersusunnya Laporan Review dari Tim Pengawas Internal <b>Outcome:</b> Tersedianya Laporan Review dari Tim Pengawas Internal	orang rupiah  Lap	7 301.464.000  2	7 157.314.200  2	100% 52,18%  100%	
		3	Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah	<b>Input:</b> SDM Dana <b>Output:</b> Tersusunnya LAKIP 2008, Laporan Keuangan 2009, dan Laporan Evaluasi <b>Outcomes:</b> Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	orang rupiah  Keg  %	30 442.934.000  4  100	30 260.725.400  4  100	100% 58,86%  100%  100%	
		4	Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	<b>Input:</b> SDM Dana <b>Output:</b> Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban keuangan <b>Outcome:</b> Tersedianya dokumen pertanggungjawaban	orang rupiah  %  %	17 235.220.000  100  100	17 144.017.200  100  100	100% 61,23%  100%  100%	

Jakarta, 22 Februari 2010  
Sekretaris Jenderal

Janedjri M. Gaffar  
NIP. 19631025 198802 1 001

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	TARGET	SATUAN				
0	1	2	3	4	5	6	7	
<b>BIRO ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN</b>								
1	Tersedianya SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi	1	Terselenggaranya Diklat Kepaniteraan	100%	orang	100	100%	
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkara, persidangan dan dokumentasi yang modern, cepat dan tepat.	1	Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi dan petunjuk teknis	10 PMK/juknis	PMK	9	90%	Perkara PHPU dan PEMILU Kada
		2	% Jumlah perkara yang diregistrasi	140	%	152	109%	
		3	% jumlah pelayanan sidang	560	%	608	109%	
		4	% jumlah perkara yang diputus	120	%	135	113%	
		5	% jumlah Putusan Tepat Waktu sidang	100	%	100	100%	
		6	% jumlah perkara yang telah diminutasi	120	%	135	113%	
		7	% jumlah perkara yang telah di-digitalisasi	120	%	135	113%	
		8	% jumlah arsip perkara yang telah putus diserahkan ke ANRI	120	%	135	113%	
		9	% jumlah risalah sidang	600	%	760	127%	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2009**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>BIRO UMUM</b>								
1	SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasiskan kompetensi	1	% pegawai yang telah mengikuti diklat PIM I-IV	%	80	80	100%	
		2	Ratio pegawai yang telah mengikuti diklat teknis sesuai kompetensi bidang tugas	%	80	80	100%	
		3	% pegawai yang telah mengikuti diklat Prajabatan	%	80	80	100%	
		4	% pendidikan formal yang diperoleh pegawai dalam jumlah susunan Jabatan dan syarat jabatan	%	80	80	100%	
2	Pengelolaan kepegawaian yang profesional	1	Dokumen Reformasi Birokrasi : 1. Dokumen Analisa Jabatan 2. Dokumen Assesmen Individu 3. Dokumen Sistem Penilaian Kinerja	%	80	80	100%	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2009**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET			
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>							
1	Terbukanya akses masyarakat terhadap persidangan MK	1	Berfungsinya sistem informasi MK	Sistem	8	8	100%
2	Terjalinnnya Kerjasama dengan Lembaga Eksternal	1	Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan FH PT	MoU	34	34	100%
		2	Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama yang Ditandatangani dengan Pusat Kajian Konstitusi/Organisasi kemasyarakatan/Pemda	MoU	56	71	127%
3	Tersosialisasinya isu konstitusi dan keberadaan Mahkamah Konstitusi	1	Jumlah forum komunikasi tatap muka	Forum	59	142	241%
		2	Jumlah program siaran interaktif melalui media elektronik	Media	2	36	1800%
		3	% Putusan MK yang dipublikasikan melalui media massa dan website	Putusan	100	40	40%
		4	Jumlah jenis publikasi MK yang didistribusikan ke masyarakat	Buku	31	21	68%
4	Terciptanya pelayanan bagi kegiatan pimpinan	1	Terselenggaranya kegiatan protokoler dan tata usaha pimpinan MK	Bulan	12	12	100%

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
SEKERETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET			
1		2	3	4	5	7	8
<b>PUSAT PENELITIAN DAN KAJIAN</b>							
1	Tersedianya materi substantif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK	1 Laporan penelitian	Laporan	2	1	50%	
		2 Kajian Perkara	Laporan	2	1	50%	
		3 Penyelenggaraan seminar tentang hukum dan konstitusi	Kegiatan	9	9	100%	
2	Persentase referensi tentang hukum dan konstitusi	1 Pustaka Konstitusi	Laporan	2	1	50%	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2009**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>							
1	Terlaksananya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja MK	1	Tingkat ketersediaan perolehan Anggaran	%	100	100	100%
		2	Renstra 2010-2014	Dok	1	1	100%
		3	Opini Laporan keuangan	Lap WTP	1	1	100%
		4	Laporan Evaluasi	Lap	4	4	100%
		5	LAKIP 2008	Lap	1	1	100%
		6	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat diterima pertanggungjawabannya oleh KPPN	%	100	100	100%
		7	Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban perbendaharaan	%	100	100	100%

Jakarta, 22 Februari 2010  
Sekretaris Jenderal

Janedjri M. Gaffar  
NIP. 19631025 198802 1 001